

**BAB 4**  
**GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**4.1. Keadaan Geografis Kota Tangerang Selatan**

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2005 pada tanggal 29 Oktober 2008. Kota Tangerang Selatan menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah 147.19 km dan penduduk pada tahun 2007 ± 918.783 jiwa (penjelasan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 bagian 1. Umum), meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2008 sekitar 1.051.374 jiwa. Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 sebesar 1,44%, maka proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 1.203.099 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 adalah ± 8.174 jiwa/km<sup>2</sup>

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PAMULANG	125.886	122,315	248.201
2	SERPONG	50.680	49.675	100.355
3	CIPUTAT	82.886	78.840	161.726
4	CIPUTAT TIMUR	80.351	80.053	160.404
5	SERPONG UTARA	38.385	39.014	77.399
6	SETU	28.815	27.604	56.419
7	PONDOK AREN	125.667	121.203	246.870
	JUMLAH	532.670	518.704	1.051.374

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2008

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2009

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PAMULANG	144.053	139.996	284.019
2	SERPONG	57.994	56.844	114.837
3	CIPUTAT	94.847	90.217	185.065
4	CIPUTAT TIMUR	91.947	91.606	185.066
5	SERPONG UTARA	43.924	44.644	88.569
6	SETU	32.973	31.588	64.561
7	PONDOK AREN	143.802	138.694	282.496
	JUMLAH	609.540	593.559	1.203.099

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2008

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang berbatasan dengan Povinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan Provinsi Jawa Barat, serta berbatasan langsung dengan 5 kabupaten kota, yaitu:

1. Kota Depok ( Provinsi Jawa Barat )
2. Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat )
3. Kabupaten Tangerang
4. Kota Tangerang
5. Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan kondisi geografis tersebut, maka Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang mempunyai karakter tersendiri. Kesenjangan penduduk di dua propinsi yang berdekatan (DKI Jakarta dan Banten) cukup signifikan, baik dari tingkat asli daerah, pendapatan perkapita, maupun tingkat layanan masyarakat. Suatu contoh dalam dunia pendidikan. Di DKI hampir semua sekolah dasar dan sekolah menengah memiliki fasilitas yang memadai dan ruang belajar yang lebih nyaman, karena sebagian besar sekolah sudah terpasang AC di setiap ruang kelas.

## 4.2. Kondisi Sosial

### 4.2.1. Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%.

Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10%

Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau 5,45%.

Jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 63.147 orang. 40.470 orang merupakan siswa yang bersekolah di SMP, sedangkan 9.501 orang bersekolah di MTs, baik swasta maupun negeri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3  
Data Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13 – 15 Tahun

No	Kecamatan	USIA SMP / MTs.		
		L	P	Jumlah
1	PAMULANG	7,318	7,031	14,349
2	SERPONG	2,959	2,843	5,802
3	CIPUTAT	4,769	4,582	9,351
4	CIPUTAT TIMUR	4,637	4,637	9,274
5	SERPONG UTARA	2,238	2,238	4,476
6	SETU	2,867	2,755	5,622
7	PONDOK AREN	7,279	6,994	14,273
J U M L A H		32,067	31,080	63,147

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009

Dalam menjalankan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mampu menopang biaya pendidikan warganya, baik operasional maupun investasi, bahkan sebagian biaya personal pun dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Untuk jenjang SD dan SMP, selain sekolah gratis, Perpustakaan sekolahpun sudah mampu mencukupi kebutuhan buku pelajaran peserta didik dengan rasio satu buku satu orang siswa. Biaya kegiatan ekstrakurikuler juga digratiskan. Program ini dapat berjalan bukan hanya karena kemampuan daerah, tetapi juga adanya kemauan bersama antara pemerintah daerah dengan satuan pendidikan, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan oleh sekolah, serta adanya pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan program. Kondisi ini menyebabkan setiap tahun hampir 5-10% tamatan SD dan SMP yang pada umumnya memiliki kemampuan diatas rata-rata peserta didik Kota Tangerang Selatan, lebih memilih melanjutkan pendidikan di DKI..

Dimulai dari keprihatinan inilah, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan berupaya mengumpulkan data dari berbagai instansi untuk pemetaan, menganalisis, serta menentukan langkah-langkah strategis, membangun sumber daya kota Tangerang Selatan, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga satuan pendidikan di kota Tangerang Selatan dapat menjadi pilihan utama bagi peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi.

Di samping itu, perkembangan masyarakat kota Tangerang Selatan diharapkan dapat mampu menjadi daya tarik bagi pembangunan pendidikan di propinsi Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya mengingat di kota Tangerang Selatan terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran namun masih belum diberdayakan. Sebagai contoh Puspitek yang mempunyai alat-alat laboratorium kelas Internasional belum dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan yang ada.

#### 4.2.1.1 Kondisi Pendidikan Jenjang SMP

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah Sekolah Dasar. Tujuan pendidikan pada jenjang ini adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

#### 4.2.1.2 Pemetaan Mutu

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan berjumlah 131 sekolah, yang terdiri atas 17 sekolah negeri dan 114 sekolah swasta.. Dilihat dari kualifikasinya terdiri dari Sekolah Rintisan, Sekolah Potensial, Sekolah Rintisan Standar Nasional (RSSN), Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Adapun data sekolah dan kualifikasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Jumlah SMP berdasarkan kualifikasinya

No	Jenis Satuan Pendidikan	Kualifikasi					
		Rintisan	Potensial	RSSN	SSN	RSBI	SBI
1	SMP	18	88	6	18	1	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2009

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa sebagian besar SMP yang ada di Kota Tangerang Selatan belum memenuhi standar, terutama sekolah-sekolah swasta. Untuk itu ke depan pemerintah perlu mendorong pengembangan sekolah, baik negeri maupun swasta agar mampu meningkatkan kualifikasinya. Upaya tersebut berupa pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Adapun daftar sekolah yang berada di Kota Tangerang Selatan dengan status dan kualifikasinya terlampir pada tabel 4.5

Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Tangerang Selatan terdiri dari 17 sekolah negeri 124 sekolah swasta, atau 13% negeri dan 87 % swasta 87% swasta. Di antara sejumlah sekolah swasta tersebut terjadi disparitas yang cukup

jauh satu sama lain. Ada sekolah swasta yang memiliki sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang sangat baik, namun di sisi lain terdapat sekolah swasta yang serba kekurangan. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu memiliki peta mutu sekolah yang riil agar kebijakan-kebijakan pemberian bantuan tepat sasaran.

#### 4.2.1.3. Kurikulum

Kurikulum dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari atas:

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. kelompok mata pelajaran estetika
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah

Tabel 4.6  
Struktur Kurikulum SMP

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
	32	32	32

2\*) ekuivalen dengan 2 jam pelajaran

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2009

Secara formal SMP-SMP di Kota Tangerang Selatan sudah mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), namun dari segi pemahaman konsep dan implementasinya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut tampak pada dokumen KTSP yang dibuat dan disampaikan kepada dinas pendidikan sebagian besar masih mengadopsi dari contoh dokumen KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional. Keberadaan dokumen KTSP tersebut masih sebatas pemenuhan kewajiban administrasi.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka ke depan dinas pendidikan perlu meningkatkan sosialisasi, sehingga seluruh pengelola sekolah memiliki

pemahaman komprehensif terhadap KTSP. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis KTSP dengan mengoptimalkan tim pengembang kurikulum (TPK) kota Tangerang Selatan.

#### 4.2.1.4. Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari segi kualifikasi akademik dan status kepegawaiannya. Berdasarkan kualifikasi akademik, tenaga pendidik kota Tangerang Selatan terdiri dari 7% berkualifikasi < S1, 85% berkualifikasi S1, 8% S2.

Ditinjau dari status kepegawaiannya kondisi tenaga pendidik terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) 578 orang, guru tetap yayasan (GTY) 656 orang, diperbantukan (DPK) 52 orang, guru tidak tetap 843 orang.

Kondisi tenaga kependidikan dilihat dari kualifikasinya terdiri dari 32 orang berijazah S1, 45 orang berijazah D2 dan D3, 187 orang berijazah SMA dan 47 orang berijazah di bawah SMA. Ditinjau dari status kepegawaiannya kondisi tenaga kependidikan terdiri dari 42 orang PNS dan 269 orang non PNS.

Berdasarkan data-data kualifikasi tenaga pendidik di atas tampak masih terdapat tenaga pendidik (guru) yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Selain itu masih terdapat cukup banyak tenaga pendidik yang berstatus sebagai GTT, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini perlu dibenahi, terkait dengan hak-hak yang harus diperoleh guru. Misalnya untuk kepentingan pemenuhan hak guru untuk mendapat sertifikat pendidik, maka perlu memiliki status kepegawaian yang tetap, baik sebagai PNS maupun guru tetap yayasan.

#### 4.2.1.5. Peserta Didik

Peserta didik pada jenjang SMP berjumlah 40.470 siswa, yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Siswa sekolah negeri berjumlah 15.271 siswa dan siswa sekolah swasta 25.199 siswa.

Perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta (13% : 83%), tidak linier dengan perbandingan jumlah siswanya 38% : 62%. Secara riil di lapangan hal ini tampak pada sekolah-sekolah swasta yang jumlah seluruh siswanya (kelas VII,

VIII, dan IX) kurang dari 100 siswa, bahkan ada yang kurang dari 50 siswa. Dengan demikian masih banyak sekolah swasta yang jumlah siswanya dibawah daya tampung yang dimilikinya.

#### 4.2.1.6 Sarana Prasarana

Sebagian besar SMP di Kota Tangerang Selatan belum mampu memenuhi Standar Sarana Prasarana sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007. Berikut ini adalah gambaran kondisi sarana prasarana pembelajaran pada jenjang SMP dari 131 sekolah:

1. Ruang kelas	614 ruang
2. Ruang perpustakaan	52 ruang
3. Ruang laboratorium IPA	50 ruang
4. Laboratorium bahasa	23 ruang
5. Laboratorium komputer	55 ruang
6. Ruang keterampilan	9 ruang

#### 4.2.2. Kesehatan

Jumlah Balita yang ditimbang adalah sebanyak 82.098 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 92,70% dalam keadaan gizi baik, 0,37% gizi buruk, 5,18% gizi kurang dan 1,74% gizi lebih. Selain keadaan gizi balita, juga disajikan data terkait kondisi kesehatan ibu, kesehatan keluarga miskin, dan kesehatan orang lanjut usia.

Jumlah rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan ada 9 unit yang seluruhnya milik swasta karena Kota belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) biasa berjumlah 10 unit, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 1 unit, Puskesmas Pembantu 8 unit dan Puskesmas Keliling 10 unit. Selain itu juga terdapat Balai Pengobatan, Praktek Dokter dan Rumah Bersalin.

Jumlah total pos pelayanan terpadu (Posyandu) berjumlah 771 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 4.127 orang kader aktif. Selain itu juga terdapat 108 pos pembinaan terpadu (Posbindu).

#### 4.2.3. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Petugas Keluarga Berencana (KB) berjumlah 48 orang yang terdiri dari 24 orang dokter dan 24 orang bidan. Selain petugas KB, juga terdapat institusi masyarakat dalam kegiatan KB. Jumlah peserta KB baru adalah sebesar 10.522 peserta atau 56,52% dari total perkiraan permintaan masyarakat (PPM) sedangkan jumlah peserta KB aktif adalah sebesar 120.081 peserta.

Panti sosial yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah panti asuhan anak sejumlah 14 panti dan tresna werdha sejumlah 5 panti dan bina grahita sejumlah 1 panti. Potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di antaranya adalah tenaga kesejahteraan masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna.

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera adalah sebesar 8.789 Keluarga atau 3,65% dari total 24.700 keluarga, sedangkan tingkat kesejahteraan KS I adalah sebesar 39.319 Keluarga atau 16,34%. Sisanya, yaitu sebanyak 192.592 Keluarga atau 80,01% adalah Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus.

Tabel 4.7  
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Menurut Kecamatan  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2007

No	Kecamatan	Pra sejahtera	KS I	Tahap II	Tahap III	Tahap III Plus	Jumlah
1	Serpong	1.157	4.538	9.439	6.874	4.444	26.454
2	Serpong Utara	547	2.543	8.961	5.290	2.990	20.435
3	Setu	348	4.787	2.575	3.840	1.300	11.541
4	Pamulang	4.155	8.609	19.621	14.596	7.784	54.765
5	Ciputat	678	7.213	5.115	7.310	13.618	33.934
6	Ciputat Timur	235	6.204	10.334	10.945	8.621	36.341
7	Pondok Aren	1.568	6.730	23.401	15.931	9.600	57.230
		8.789	39.319	79.446	64.789	48.789	240.700

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun 2008

Berdasarkan validasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, jumlah rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 19.104 RT. Jumlah penerima paling banyak di Pamulang yaitu sebanyak 5.963 rumah tangga,

sedangkan paling sedikit di Ciputat Timur yaitu sebanyak 1.685 rumah tangga.

Tabel 4.8  
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Kecamatan  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

No	Kecamatan	Rumah Tangga Penerima BLT	Hasil Verifikasi PPLS 2008
1	Serpong	2.463	2.420
2	Serpong Utara	1.742	1.590
3	Setu	1.993	1.817
4	Pamulang	5.963	5.299
5	Ciputat	2.438	1.848
6	Ciputat Timur	1.685	918
7	Pondok Aren	2.820	2.411
		19.104	16.303

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun 2008

Dapat terjadi perbedaan angka antara masyarakat miskin dalam BLT dengan masyarakat miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan BKKBN karena terdapat perbedaan kriteria dan kategori dalam penentuan kelompok masyarakat miskin. Rumah tangga penerima BLT ditentukan berdasarkan 14 variabel dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu Sangat Miskin, Miskin dan Mendekati Miskin. Tingkat kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera Tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III. .

Empat belas (14) variabel kemiskinan rumah tangga penerima BLT adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per kapita
- b. Jenis lantai berupa tanah, bambu atau kayu murahan
- c. Dinding bangunan berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester
- d. Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau berbagi dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik
- f. Sumber air minum berupa sumur, mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan
- g. Bahan bakar untuk masak berupa kayu bakar, arang atau minyak tanah

- h. Konsumsi daging/ayam per minggu satu kali atau tidak mengkonsumsi
- i. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun sebanyak satu stel atau tidak membeli
- j. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga adalah 1 kali atau 2 kali
- k. Tidak mampu membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik
- l. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh angunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp.600 ribu per bulan
- m. Kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD
- n. Pemilikan asset/harta bergerak/harta tidak bergerak, tidak mempunyai tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai kurang dari Rp.500 ribu seperti sepeda motor, emas, perhiasan, ternak, perahu motor atau barang modallainnya.

Kategori-kategori dalam penentuan penerima BLT adalah:

- a. Sangat Miskin: emenuhi 14 variabel kemiskinan
- b. Miskin: memenuhi 11-13 variabel kemiskinan
- c. Hampir miskin: memenuhi 9-10 variabel kemiskinan
- d. Tidak layak menerima BLT: memenuhi  $\leq 8$  variabel kemiskinan

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN adalah sebagai berikut:

(1) Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Indikator Ekonomi
  - a) Makan dua kali atau lebih sehari
  - b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian)
  - c) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah
- b. Indikator Non-Ekonomi
  - a). Melaksanakan ibadah
  - b) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

(2) Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”)

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

a. Indikator Ekonomi

- a). Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
- b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- c) Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni

b. Indikator Non-Ekonomi

- a) Ibadah teratur
- b) Sehat tiga bulan terakhir
- c) Punya penghasilan tetap
- d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin
- e) Usia 6-15 tahun bersekolah
- f) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

(3) Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Mengikuti kegiatan masyarakat
- d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- e) Meningkatkan pengetahuan agama
- f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- g) Menggunakan sarana transportasi

(4) Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Mengikuti kegiatan masyarakat
- d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- e) Meningkatkan pengetahuan agama

- f). Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- g) Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

#### (5) Keluarga Sejahtera III Plus

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

### 4.3. Pendapatan Regional

#### 4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 Juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.768.787,17 Juta. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp.5,042 Juta. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%. Pada tahun 2003, PDRB per kapita atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.863.517 sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar 1.042.862

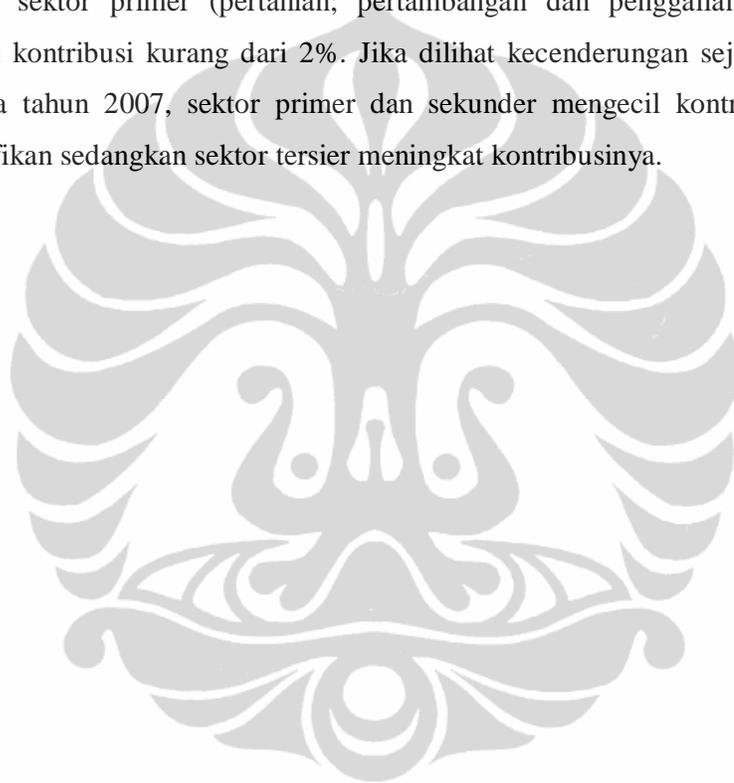
Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat Timur yaitu sebesar Rp.1.678.739,29 Trilyun atau 31,93% dari total PDRB sedangkan yang terkecil adalah Setu dengan Rp.71.045,74 Trilyun atau 1,35%.

#### 4.3.2. Struktur Ekonomi

Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank,

persewaan dan jasa perusahaan (15,40%). Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%.

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tersier meningkat kontribusinya.



## **BAB 5**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama. Dalam bagian ini juga akan berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap sebab-sebab mereka tidak melanjutkan sekolah yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan masyarakat dan anaknya yang tidak melanjutkan sekolah serta dinas pendidikan juga kepala sekolah SMP kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan.

#### **5.1. Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dinyatakan dalam bab terdahulu, bahwasanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui partisipasi siswa lulusan Sekolah Dasar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan mengetahui faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di kota Tangerang Selatan. Untuk itu peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan informan di lingkungan masyarakat, juga informan dari dinas pendidikan kota setempat dan kepala sekolah SMP.

Minat adalah dorongan yang paling kuat berasal dari individu (Surtínah, 2004). Aktivitas seseorang yang dijalankan sehari-hari bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut dipengaruhi dan didorong oleh motif yang berasal dari dalam dan dari luar. Semakin besar dorongan untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka semakin kuat usaha seseorang untuk mencapai keberhasilan yang diinginkannya.

Besar kecilnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam wajib belajar sembilan tahun berhubungan erat dengan wawasan mereka tentang pendidikan. Jika wawasan orang tua tentang pendidikan kurang, maka biasanya mereka kurang mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah, tetapi sebaliknya jika orang tua mempunyai wawasan pendidikan yang luas, mereka akan berusaha semaksimal mungkin mendorong anak-anaknya bersekolah. Oleh karena itu, Crow dan Crow dalam Kasjian (1988) mengatakan bahwa minat adalah

kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang distimuli oleh kegiatan itu sendiri.

Dari pendapat tersebut di atas jelas terlihat bahwa bila masyarakat mempunyai minat besar untuk menyekolahkan anaknya, maka mereka akan berusaha sekuat-kuatnya mendorong anak mereka agar mereka bersekolah. Tentu saja hal tersebut mungkin berbeda dengan kenyataan yang ada.. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Berangkat dari hal-hal tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Hal pertama yang ingin diketahui oleh peneliti adalah tentang partisipasi siswa lulusan sekolah dasar melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah pertama. Berkenaan dengan hal tersebut, didapat keterangan bahwa sebenarnya masyarakat sebenarnya ingin ikut berpartisipasi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Satiri "*dulu sepertinya dia tidak ada minat untuk melanjutkan sekolah, ketika dia mau sekolah, saya sudah tidak bekerja....*" (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rini yang mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menyekolahkan anaknya tetapi hal itu tidak bisa terjadi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Ernawati bahwa ia ingin sekali memasukkan anaknya sekolah. Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Yopi yang menyatakan bahwa ia juga ingin menyekolahkan anaknya tetapi ia tidak mampu karena tidak ada biaya. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Yanto bahwa ia tidak dapat menyekolahkan anaknya tetapi sebenarnya ingin sekali memasukkan anaknya sekolah.

Ketika hal ini ditanyakan kepada anak-anak mereka mengapa mereka tidak sekolah mereka menjawab bahwa mereka ingin sekali melanjutkan sekolah tetapi mereka tidak bisa sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Ridwan: "*..... Sebenarnya sih saya pengen sekolah atau kursus supaya pintar.*" (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Galang yang mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin sekolah lagi, tapi tidak bisa jadi ia terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Ia mengatakan bahwa ia ingin sekolah supaya pintar dan mendapatkan pekerjaan

Demikian juga halnya dengan Riky yang ingin sekali seperti teman-temannya yang lain yang dapat bersekolah. Ia ingin sekolah lagi supaya masa depannya cerah seperti dokter dan presiden.

Senada dengan anak-anak tersebut, Sandi pun merasakan hal yang sama. Ia juga ingin bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Persoalannya pun sama dengan yang lainnya, ia tidak dapat melanjutkan sekolah. Sama halnya dengan Rohman, ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya padahal ia ingin merasakan bangku sekolah di Sekolah Menengah Pertama.

Bila dilihat dari uraian-uraian tersebut, sebenarnya baik orang tua maupun anak-anak mereka sebenarnya mempunyai minat untuk berpartisipasi melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama tetapi karena sesuatu hal mereka tidak bisa. Miris memang mengetahui hal tersebut, di satu sisi mereka ingin berpartisipasi melanjutkan sekolah tetapi di sisi lain mereka tidak bisa mewujudkan hal tersebut.

Berbicara tentang partisipasi berarti memberikan kesempatan kepada semua unsur pelaksana yang terlibat untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan, baik secara psikologis maupun secara tindakan fisik. Bila dikaitkan dengan wajib belajar, berarti memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diinformasikan oleh Bapak I dari Dinas Pendidikan yang mengatakan:

*“.....Jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTS sebesar 63.147 orang terdiri dari 32.067 orang laki-laki dan 31.080 orang perempuan. Dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat siswa SMP sebanyak 40.470 orang dan siswa MTs sebesar 9501 orang... Untuk APK dibuat berdasarkan data yang ada saja artinya dimulai dari data yang dibuat oleh BPS dan perkembangan jumlah siswa atau murid*

*yang ada. APMnya belum bisa kita hitung secara pasti karena anak-anak yang tinggal diperbatasan misalnya di Ciputat bersekolah di Jakarta, untuk Pondok Aren bersekolah di kota Tangerang. Jadi sulit untuk menentukan berapa persen anak yang bersekolah di DKI Jakarta. Secara yuridis formal mereka berdomisili di kota Tangerang Selatan tapi berpartisipasi ke DKI Jakarta. Walaupun bisa dihitung itu hanya untuk SMP yang negeri saja tetapi yang untuk SMP swasta belum bisa dipastikan berapa jumlahnya.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2009)*

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak M, Kepala Sekolah SMP 17 yang mengatakan:

*“.....Wajib belajar sembilan tahun menerima siswa tergantung daya tampung yang ada bagi semua siswa, tidak memandang dia keluarga mampu atau tidak mampu dan memberikan kepada orang tua bahwa anak itu harus mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Karena daya tampung kita terbatas, yaitu pendaftaran 1200 siswa tapi hanya menerima 300 orang. Yang kedua menerima pendaftaran mereka mereka tanpa melihat dana. Batas minimal NEM adalah 26... Di sini partisipasinya terhadap wajib belajar sudah bagus.” (wawancara pada tanggal 16 Desember 2009)*

Pernyataan ini sama dengan yang dinyatakan oleh Bapak S, Kepala Sekolah SMP Pelita Bangsa yang mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah sudah cukup bagus. Pihak sekolah akan membantu program wajib belajar. Sekolah akan berusaha membantu mereka sampai selesai sekolah.

Melihat hal tersebut di atas sebenarnya sudah sejalan dengan tiga pilar pendidikan nasional yang salah satu di antaranya adalah perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Schiefelbein & Farrel (1982) yang dikutip oleh Suryadi dan Tilaar (1993) bahwa landasan konsep pemerataan pendidikan (*equality of educational opportunity*) adalah (1) pemerataan

kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*) yaitu berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan; (2) pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (*equality of survival*) yang menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan; (3) pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*) yang menunjukkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan keterampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya; (4) pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*) yang menunjukkan keberhasilan pendidikan secara eksternal dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dikaitkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi.

Berbicara mengenai pemerataan kesempatan, sebenarnya pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat bersekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak N:

*“.....Selama tiga pilar pendidikan itu masih ada, persoalan untuk menuntaskan wajib belajar merupakan persoalan yang pertama. Program yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk mendirikan sekolah. Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk itu agar dapat menampung semua anak yang ingin bersekolah untuk mengatasi persoalan perluasan akses. Yang kedua melakukan pendataan anak-anak usia sekolah, jumlah anak yang riel sekolah, kemudian baru dianalisis untuk mengetahui APK dan APM. Setelah diketahui jumlah APK dan APMnya kita mendirikan sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah SD kita punya 308, 201 negeri, swasta 107. Untuk SMPN 17, swasta 116 jmlahnya 133. Nah, ini untuk mengatasi persoalan pemerataan tadi yaitu agar anak-anak usia sekolah*

*tertampung di sekolah. Di sekitar sini ada sebuah komplek perumahan yaitu Pamulang II yang di sekitarnya terdapat 8 SMP swasta karena kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah. Karena kita tidak bisa mengharapkan pemerintah sepenuhnya, kemampuan pemerintah kan terbatas sehingga kita yang memberikan kesempatan. Sekolah bisa bersaing dalam hal pelayanannya, mutunya, inovasinya agar dapat menarik minat masyarakat. Jika sekolah tersebut, pelayanannya bagus, mutunya juga bagus dan inovasinya juga bagus pastinya masyarakat akan berbondong-bondong untuk bersekolah di sana. Tetapi jika sekolah tersebut pelayanan, mutu, dan inovasinya tidak bagus secara alamiah masyarakat kurang tertarik untuk bersekolah di sana. Persoalan perluasan akses dan kesempatan belajar nampaknya teratasi dengan hal tersebut namun keberadaannya belum merata. Untuk di satu daerah mungkin sudah cukup merata tetapi untuk daerah lain belum tentu seperti di kecamatan Setu baru ada 1 SMPN. Di situ akan kita bangun sekolah. Mendirikan sekolah itu kan anggarannya yang terbatas, jika anggarannya memadai kita akan membangun sekolah. Ini solusi yang kedua...”.* (wawancara pada tanggal 14 Desember 2009)

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak M, Kepala Sekolah SMP 17 dengan mengatakan:

*“.....mengadakan sosialisasi masyarakat melalui RT/RW dan jika orang tua ingin menyekolahkan anaknya kami persilakan untuk mendaftar. ....tempat tinggalnya jauh, ada yang dari Pamulang, Ciputat, Bogor dan yang dari Jakarta juga ada, Jakarta Selatan, Pasar Jumat, tapi kebanyakan mereka tinggal di sekitar sini. Mereka sekolah di sini karena biayanya murah tapi fasilitasnya lengkap. Dari pendaftaran kemarin di sini pendaftarannya terbanyak.”* (wawancara pada tanggal 16 Desember 2009)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak S, Kepala Sekolah Pelita Bangsa yang mengatakan bahwa mereka memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah tersebut. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa baik pihak Dinas Pendidikan dan sekolah sudah memberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya kepada semua masyarakat agar dapat bersekolah untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Ini dapat dilihat dengan banyaknya lulusan Sekolah Dasar yang mendaftarkan diri untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Namun sayangnya masih ada masyarakat yang belum mendapat kesempatan melanjutkan sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang didapat oleh Ibu Rini: *“saya ga tau tentang program itu. Tapi saya rasa itu cukup bagus karena menyarankan anak untuk sekolah dan belajar.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Yopi: *“saya tidak tahu. Itu apaan si bu. Maklum saya ga pernah dengar. Tidak pernah tahu masalah itu.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Yanto yang mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang program wajib belajar.

Lain halnya dengan Ibu Ernawati yang mengatakan bahwa wajib belajar adalah anak belajar sembilan tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Ia mengatakan bahwa wajib belajar cukup bagus karena menganjurkan anak supaya sekolah dan pintar akhirnya bekerja membantu orang tua.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Satiri bahwa wajib belajar bagus tetapi harus diiringi dengan kemampuan. Ia juga mengatakan jika program wajib belajar itu gratis untuk semua anak, maka mereka mau sekolah tetapi karena masalah biaya yang menyebabkan mereka patah semangat untuk melanjutkan sekolah.

Keterangan yang sama juga didapat dari anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya. Seperti Ridwan mengatakan: “.....saya ga tau tentang hal itu, di sekolah ga pernah dijelaskan.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Begitu juga dengan Galang yang mengatakan bahwa ia juga tidak tahu tentang wajib belajar. Ia tidak pernah mendengarnya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal.

Senada dengan Sandi dan Rohman yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Mereka tidak pernah mendengar hal tersebut. Riky mengetahui tentang wajib belajar sembilan tahun, yaitu belajar di sekolah dasar 6 tahun dan di sekolah menengah pertama 3 tahun.

Keterangan-keterangan di atas membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui tentang program wajib belajar. Menurut mereka hal itu tidak pernah mereka dengar atau dapatkan dari pihak sekolah maupun pemerintah. Begitu pula ketika mereka ditanya tentang sekolah informal atau tempat-tempat kursus, mereka tidak mengetahuinya dengan pasti. Hal ini dikatakan oleh Pak Satiri: “.....ada paket A apa B ya. Tapi kayaknya cuma paket B. informasinya dari mulut ke mulut karena warga tidak dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan informasi.” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rini, Ibu Ernawati, Bapak Yopi dan Bapak Yanto bahwa informasi tersebut tidak mereka dapatkan secara formal karena memang tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Informasi yang mereka dapatkan adalah secara lisan.

Hal ini didukung oleh bapak N dari dinas pendidikan yang mengatakan bahwa bila masih ada anak yang mengatakan ingin sekolah tetapi tidak ada biaya, mungkin alasannya adalah jenis bantuan untuk anak yang kurang mampu belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa peran media massa sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam memberikan informasi karena informasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Di atas telah dikemukakan bahwa sebenarnya anak-anak ingin melanjutkan sekolah. tetapi karena sesuatu hal, maka keinginannya untuk memasukkan anaknya sekolah tidak dapat terwujud. Seperti yang dikatakan oleh bapak Satiri: “....ketika dia sudah mau sekolah, saya sudah tidak bekerja lagi sehingga tidak

*mempunyai biaya lagi untuk memasukkan dia sekolah.* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Serupa dengan Ibu Rini yang mengatakan bahwa karena biaya ia tidak dapat menyekolahkan anaknya. Sama halnya dengan ibu Ernawati yang mengatakan anaknya tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Begitu pula dengan Bapak Yopi dan Bapak Yanto, mereka tidak dapat memenuhi keinginan anak-anak mereka karena masalah biaya.

Ketika hal ini ditanyakan kepada anak mereka tentang alasan mereka tidak melanjutkan, mereka menjawab karena masalah biaya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ridwan: *"saya tidak melanjutkan sekolah karena orang tua saya tidak mempunyai biaya."* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Keterangan yang sama juga didapat dari Galang. Ia mengatakan: *"Saya ga sekolah karena tidak ada biaya."* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Hal yang sama juga terjadi pada Ricky, Sandi dan Rohman. Mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena terbentur masalah biaya. Tampaknya bila dilihat dari uraian di atas, mereka mempunyai masalah yang sama yaitu masalah ekonomi.

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak N dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang mengatakan bahwa sebenarnya persoalan ekonomi bukan lagi menjadi kendala untuk mereka melanjutkan sekolah. Seperti yang dikatakan sebagai berikut:

*".....Yang ketiga adalah anak usia sekolah yang tidak mampu sekolah. Permasalahannya adalah ekonomi. Secara normatif diatasi dengan adanya BOS pusat, yang kedua BOS daerah dari APBD, yang ketiga subsidi silang sehingga yang tidak mampu gratis. Ada BOS buku, dan ada retrieval, untuk anak yang drop out supaya bisa sekolah lagi. Ada anggaran BSM: Beasiswa Siswa Miskin, BAGUS: Beasiswa gubernur untuk siswa untuk anak yang kurang mampu, beasiswa siswa berprestasi. Program ini sudah mulai dilaksanakan dan pelaksanaannya BSM ada kuota ada 1800 siswa di data per sekolah untuk SMP. Jika untuk SD di sesuaikan dgn tingkat kemampuannya masing-masing. Setelah itu sekolah mengusulkan*

*nama-nama siswa yang harus dibantu didukung oleh keterangan RT/RW sehingga benar-benar disalurkan kepada siswa yang tidak mampu. Setelah itu kita menetapkan nama-nama siswa yang perlu dibantu dan kemudian ada MoU yang ditandatangani oleh pihak sekolah. Jadi dinas hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi saja. Dengan bantuan tersebut, sekolah memberikan kebebasan kepada siswa yang tidak mampu untuk tidak membayar apapun untuk keperluan sekolah, walaupun hanya untuk fotocopy, semuanya gratis untuk mereka. Jadi kendala-kendala yang ada untuk mengikuti program wajib belajar tereliminir dengan adanya bantuan-bantuan tersebut. Ada perwal: peraturan walikota no 36/2009 yang menyebutkan masyarakat boleh menyumbang dana pendidikan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaannya adalah sekolah membuat RKAS: rencana kerja anggaran sekolah, berapa kegiatan yang akan dilaksanakan, berapa jumlah bantuan yang ada dari pemerintah. Kemudian sekolah mengundang komite sekolah untuk bermusyawarah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yang merasa mampu ikut berpartisipasi menyumbang kekurangan kekurangannya. Sekolah gratis itu sebenarnya salah karena tidak semua siswa bisa digratiskan pendidikannya. Misalnya anak walikota, anak pengusaha tidak digratiskan karena mereka mampu untuk membayar. Nah kekurangan-kekurangan itu yang kita tutup dengan sumbangan dari masyarakat untuk membantu siswa yang kurang mampu. Sumbangan itu disebut sumbangan sukarela. Sehingga jika ada anak usia sekolah yang tidak sekolah dan mereka mengatakan karena masalah biaya atau ekonomi itu mungkin sebagai tameng. Mungkin saja anak tersebut tidak punya minat untuk sekolah lagi...”*

(wawancara pada tanggal 14 Desember 2009)

Hal ini didukung oleh keterangan dari Bapak M. Kepala Sekolah SMP 17 yang mengatakan:

*”..... Sebenarnya bukan hanya masalah biaya, sekarang kan digembar gemborkan anak tidak sekolah itu karena biaya padahal banyak faktor lain yang menyebabkan anak tidak mau sekolah. Kalau misalnya karena faktor biaya, banyak sekolah yang menyeleggarakan subsidi silang, sudah ada sekolah gratis dan bantuan beasiswa dari pemerintah seperti BSM, bantuan siswa miskin, tapi tetap saja anak tidak mau sekolah. (wawancara pada tanggal 16 Desember 2009)*

Jika dilihat lagi pernyataan antara masyarakat dengan pihak dinas pendidikan dan juga sekolah, ada perbedaan pendapat. Masyarakat mengatakan mereka tidak dapat memasukkan anaknya bersekolah karena masalah biaya, tetapi pihak dinas pendidikan dan sekolah mengatakan bahwa sebenarnya mereka bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya bukan menjadi persoalan karena hal tersebut dapat diatasi. Lagi-lagi masalahnya adalah masalah informasi karena masyarakat tidak mengetahui hal tersebut.

Tampaknya masalah biaya yang sudah disebutkan di atas berhubungan erat dengan penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulannya yang bila dihitung sebenarnya tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Satiri berikut ini: *“..... Setiap hari ongkos anak saya yang perempuan Rp 5.000,-. Dengan modal Rp 150.000,- anak saya bisa sekolah.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009)

Keterangan yang sama juga didapat dari Ibu Rini yang mengatakan: *“Tidak tentu, penghasilan saya dalam satu hari paling besar Rp 15.000,- tetapi kadang-kadang dalam satu hari tidak mempunyai penghasilan.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ernawati yang mengatakan *“.....setiap bulannya saya mendapat uang dari anak saya yang nomor tiga sebesar Rp 300.000,- dan itu semua untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarin Riky sampe nangis minta disekolahkan tapi karena saya tidak punya biaya, hal itu tidak bisa dilakukan..... ”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Begitu juga halnya dengan Bapak Yopi yang mengatakan bahwa pendapatannya dari antar jemput anak sekolah hanya Rp 250.000,- per bulan. Sama halnya dengan Bapak Yanto yang penghasilannya Rp 30.000,- sehari. Itu pun kalau ia sedang mendapatkan pekerjaan. Kalau ia tidak mendapat pekerjaan, belum tentu ia mendapatkan penghasilan.

Berbicara tentang penghasilan tentu saja berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang mereka miliki. Bila pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta yang bekerja di perusahaan besar misalnya, tentu saja masalah biaya bukan menjadi persoalan bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya. Pekerjaan mereka adalah pedagang, keamanan kampung dan tidak mempunyai pekerjaan yang pasti. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Satiri: *“Saya sudah tidak bekerja lagi. Pekerjaan saya sehari-hari membantu istri berdagang.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Demikian juga halnya dengan Ibu Rini yang mengatakan: *“.....pekerjaan ayahnya cuma petugas keamanan kampung, gajinya tidak mencukupi membiayai kebutuhan sekolah.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Sama halnya dengan Ibu Ernawati yang mengatakan bahwa suaminya sudah tidak bekerja lagi. Ibu Ernawati berjualan kue kering yang dimasukkan ke toko-toko di sekitar tempat ia tinggal

Begitu juga dengan Bapak Yopi, pekerjaannya mengantar jemput anak sekolah dan juga sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan, sedangkan Bapak Yanto, pekerjaannya adalah sebagai buruh bangunan yang kadang-kadang mendapat pekerjaan.

Tentu saja masalah pekerjaan ini juga berkaitan dengan pendidikan mereka sebagai orang tua. Bila pendidikan mereka sampai lulus Sekolah Menengah Atas atau universitas, mungkin mereka akan mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan. Pendidikan mereka rata-rata hanya sampai sekolah menengah pertama, itu pun ada yang tidak lulus karena harus berhenti samapi kelas 2, bahkan hanya sampai kelas 5 sekolah dasar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini berikut ini: *“Saya lulusan SMP, saya tidak melanjutkan ke SMA karena tidak ada biaya. Setelah itu saya tidak bekerja atau ikut kursus karena saya langsung menikah.”*

*Suami saya lulusan SD, dia tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, dia langsung kerja.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Keterangan yang sama pun di dapat dari Ibu Ernawati: *“Saya sekolah sampai kelas 5 SD, kalau bapaknya lulusan SMP.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Begitu juga dengan Bapak Yopi, ia sekolah sampai lulus Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD. Orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk memasukkan ia sekolah ke sekolah menengah pertama.

Sama halnya dengan Bapak Yanto, ia sekolah sampai lulus sekolah dasar. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena orangtuanya tidak mempunyai biaya.

Sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada Bapak Satiri. Ia sekolah hanya sampai kelas 2 SMP, karena ia mempunyai persoalan keluarga bukan masalah biaya. Hal yang menarik darinya adalah ia bisa bekerja di salah satu perusahaan otomotif Jerman. Ia bekerja di bagian pengepakan. Hal itu dikarenakan ia mempunyai keterampilan khusus sehingga ia bisa bekerja di perusahaan itu. Menurutnya hasil pekerjaannya sudah sampai ke negara-negara lain dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Penghasilannya cukup lumayan pada saat itu, tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena ia mempunyai 6 orang anak, namun sejak tahun 2001 bapak Satiri berhenti bekerja.

Berbicara masalah anak dalam sebuah keluarga, rata-rata mereka mempunyai anak lebih dari 3. Seperti Pak Satiri, ia mengatakan: *“Anak saya berjumlah 6 orang, 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang terkecil anak perempuan sekarang kelas 2 SMP, kakaknya yang di atas dia tidak sekolah”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Hal ini juga dijumpai pada keluarga ibu Rini. Seperti yang ia katakan: *“Saya mempunyai 4 orang anak. Yang pertama berumur 15 tahun, anak yang kedua 13 tahun, yang ketiga 7 tahun dan yang keempat 9 bulan.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Ibu Ernawati juga mempunyai anak lebih dari 3 orang. Seperti yang dikatakannya berikut ini:

*“Anak saya 7 orang, 2 orang sudah meninggal dunia, anak pertama saya laki-laki, sudah berkeluarga, anak kedua perempuan, juga sudah berkeluarga. Anak ketiga laki-laki, anak keempat perempuan, anak kelima laki-laki, namanya Riky Wahyudi usianya 13 tahun dan tidak sekolah lagi.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Agak sedikit berbeda dengan Bapak Yopi yang mempunyai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, berusia 14 tahun, anak keduanya berusia 13 tahun dan anak yang ketiga berusia 9 bulan. Begitu juga dengan Bapak Yanto, ia mempunyai 3 orang anak.

Dilihat dari jumlah anak yang mereka miliki, kendala yang dihadapi adalah dalam cara mereka mendidik anak-anaknya. Karena cara orang tua mendidik ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap anak mereka. Orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya misalnya akan mempengaruhi minat belajar anak menurun. Sebaliknya bila orang tua memperhatikan pendidikan anaknya, minat belajar anak akan tinggi. Bila kita lihat hasil wawancara dengan Bapak Satiri, ternyata ia menyerahkan segala sesuatunya kepada anak-anaknya. Seperti yang ia katakan: *“.....saya menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak saya. ...Semaksimal mungkin saya akan upayakan untuk belajar/sekolah tetapi kalau anaknya tidak mau saya mau bilang apa .”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Rini bahwa ia tidak bisa memaksa anaknya supaya belajar. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Yopi dan Bapak Yanto bahwa mereka tidak pernah memaksa anaknya untuk belajar. Mereka hanya menyuruh mereka belajar tetapi tidak akan memberikan sanksi bila mereka tidak belajar.

Walaupun anak-anak tersebut mempunyai saudara yang cukup banyak, ternyata hubungan mereka cukup baik. Mereka mendukung satu sama lain. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Satiri yang mengatakan:

*“Mereka sering mengarahkan adiknya. .... mereka kadang-kadang mengajarkan pelajaran karena kakaknya bekerja dari pagi sampai malam dan anaknya juga sering bermain.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Ernawati. Ia mengatakan:

*“ Hubungan anaknya baik. Mereka sering mendukung Riky supaya belajar dan sering memberikan pengarahan. Mereka juga sering mengajari riky. Tapi kalau saya tidak bisa karena saya hanya sekolah sampai kelas 5 SD...”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Pernyataan ini juga sama halnya dengan ibu Rini yang mengatakan bahwa hubungan anaknya baik. Begitu juga dengan bapak Yopi dan bapak Yanto yang menyatakan bahwa hubungan anak-anak mereka baik, saling mendukung satu sama lain.

Mempunyai anak yang cukup banyak tentunya juga mempengaruhi suasana rumah. Bila rumah yang ditempati cukup ramai, maka suasana rumah tidak nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Sebaliknya bila rumah yang ditempati penghuninya tidak banyak, maka rumah tersebut cukup nyaman untuk dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Ketika Pak Satiri ditanyakan tentang hal ini, ia menjawab:

*“Ya, semuanya masih tinggal di sini. Bahkan anak saya yang pertama juga tinggal disini dengan keluarganya.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh ibu Ernawati yang mengatakan bahwa anak pertama dan keduanya yang sudah berkeluarga masih tinggal bersama dengan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa rumah tersebut cukup ramai penghuninya dan ini dapat menyebabkan anak tidak bisa belajar dengan baik.

Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengertian orang tua. Orang tua harus memotivasi dan pengarahan serta bimbingan kepada anaknya supaya dapat membangkitkan semangat anaknya belajar.

*“Saya hanya memotivasi tapi kakaknya sering bertanya kepada Ridwan kamu jadi apa kalau tidak mau belajar.”* (wawancara dengan bapak Satiri pada tanggal 7 Desember 2009).

Ibu Rini juga hanya bisa memberikan pengarahan dan pengertian serta motivasi kepada anaknya supaya ia tetap mau belajar. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ernawati bahwa ia hanya bisa memberikan pengarahan dan motivasi kepada anaknya. Begitu juga dengan bapak Yopi dan Bapak Yanto, mereka pun tidak bisa memaksakan anak mereka supaya bisa sekolah, mereka hanya bisa memotivasi dan pengarahan supaya anak mereka mau belajar.

Lain lagi halnya dengan yang dikatakan oleh bapak M, Kepala Sekolah SMP 17. Ia mengatakan bahwa ada hal lain yang menyebabkan anak tidak sekolah: *”Faktor keluarga kadang-kadang menyebabkan anak tidak mau sekolah. Misalnya ayah ibunya bercerai, keluarga yang broken home. Jadi menurut bapaknya sekolah tapi menurut ibunya tidak. Kadang-kadang anak itu dimanja atau .....*” (wawancara pada tanggal 16 Desember 2009).

Bila anak diberikan motivasi biasanya anak akan menjadi lebih semangat untuk belajar. Seperti yang dikatakan oleh Teevan dan Smith (1976) dalam Djalali (2001) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu konstruksi yang mengaktifkan dan mengarahkan perilaku dengan cara memberi dorongan atau daya pada organisme untuk melakukan aktivitas. Dalam hasil wawancara dengan kepala sekolah didapat keterangan berikut:

*“Jenis motivasi yang kami berikan kepada anak yang belajar yang terutama tidak sekolah adalah, pertama mengadakan ekstrakurikuler, contoh memotivasi anak dalam menulis, seperti jurnalis dan silakan mereka menulis dan mencetak majalah dan menerbitkannya, dan juga kegiatan yang lain, apa yang diinginkan dan disukai oleh anak.....”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak S, kepala sekolah Pelita Bangsa yang mengatakan bahwa mereka selalu memotivasi siswa mereka agar lebih semangat untuk belajar, yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler.

Berbicara tentang motivasi, motivasi tidak hanya didapat dari orang tua dan lingkungan sekolah. Motivasi juga dapat berasal dari lingkungan masyarakat, tempat mereka tinggal. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat menyebabkan motivasinya terganggu atau tidak. Dalam hal ini bapak Satiri mengatakan: *“Cukup bagus sih, masih positif, artinya ga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar sini.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Rini dan ibu Ernawati yang mengatakan bahwa kegiatan masyarakat di tempat tinggal mereka cukup positif. Begitu juga halnya dengan bapak Yopi dan bapak Yanto mengatakan hal serupa.

Bentuk kegiatan masyarakat inipun tentunya berkaitan erat dengan teman-teman pergaulan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah tersebut. Hal ini bisa saja menyebabkan anak-anak tersebut terpengaruh atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Dari hasil wawancara dengan bapak Satiri didapat keterangan: *“.....Anak-anak di sekitar sini hobinya bermain bola dan tempat bermain bolanya juga ada, ada lahan-lahan kosong yang bisa dijadikan tempat untuk bermain bola. Kebanyakan anak-anak di sini putus sekolah.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Hal serupa dikatakan oleh ibu Rini bahwa teman-teman anaknya bermain rata-rata tidak nakal. Ada di antara mereka yang sekolah dan ada juga yang tidak

sekolah. Masalah lain yang dapat dilihat dalam wawancara dengan masyarakat adalah ketika mereka ditanyakan tentang keinginan mereka menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ada pendapat yang berbeda dari jawaban informan. Bapak Satiri mengatakan:

*“ ... Ya karena untuk anak perempuan lebih mudah mendapat pekerjaan, kesempatannya bekerja lebih besar daripada anak laki – laki. Oleh karena itu saya berusaha keras agar anak saya bisa melanjutkan sekolah yang memadai karena semakin lama biaya semakin mahal. Anak saya sekolah di SMP swasta. Walaupun pendapatan saya tidak tentu yang penting anak saya bisa berangkat ke sekolah setiap hari. Untuk SPP kadang-kadang sampai 7 bulan belum bayar dan itu biasanya saya bayar kalau saya sudah punya uang dengan mencicil. Yang penting anak saya pergi ke sekolah karena bila anak saya tidak berangkat ke sekolah walaupun Cuma 1 hari saja itu akan membuat mereka patah semangat dan tidak mau sekolah lagi.”*  
(wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Lain halnya dengan ibu Rini yang mengatakan bahwa ia menginginkan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan sekolah sampai lulus minimal SMA kalau ada biaya agar mereka mudah mendapat pekerjaan dan dapat membantu orang tuanya.

Pendapat ini pun didukung oleh ibu Ernawati yang menginginkan anaknya sekolah tinggi. Hal sama juga dikemukakan oleh bapak Yopi dan bapak Yanto yang mengharapkan agar anak mereka mudah mendapat pekerjaan.

Sebenarnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan sudah terlihat dengan jelas. Mereka hanya mengatakan pendidikan sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh bapak Satiri:

*“Cukup baik dengan sekolah sampai lulus universitas karena melihat keadaan sekarang. Tanpa pendidikan, kehidupan akan sulit. Kalaupun kita bisa, itu karena faktor keberuntungan contohnya saya. Karena saya punya keahlian maka saya bisa bekerja. Hasil pekerjaan saya bisa dinikmati oleh orang banyak yang*

*pendidikannya lebih tinggi dari saya.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Senada dengan Ibu Rini yang mengatakan: *“Pendidikan merupakan hal yang bagus karena pendidikan itu membantu anak supaya pintar.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Hal ini pun didukung oleh ibu Ernawati, bapak Yopi dan bapak Yanto yang mengatakan bahwa sekolah itu bagus karena membuat anak mereka menjadi pintar.

Ketika hal ini ditanyakan kepada anak-anak yang tidak sekolah pun, mereka mengatakan hal yang sama. Seperti Ridwan mengatakan: *“Saya sebenarnya ingin melanjutkan sekolah atau kursus supaya saya pintar..... Sekolah itu penting.”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009). Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Galang, Riky, Sandy, dan Rohman yang mengatakan bahwa pendidikan itu bagus dan penting karena membuat mereka pintar dan masa depan mereka cerah.

Berbeda dengan pendapat bapak M, Kepala Sekolah SMP 17 yang mengatakan: *“.....kadang-kadang dari masyarakat sendiri yang kurang menyadari pentingnya pendidikan dan ada juga masyarakat yang berpendapat pendidikan itu adalah bisa baca dan bisa menulis.....”*(wawancara pada tanggal 16 Desember 2009).

## **5.2. Pembahasan hasil penelitian**

Antusias siswa lulusan Sekolah Dasar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah pertama ternyata cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftaran siswa baru yang melebihi batas daya tampung yang tersedia di sekolah negeri. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah SMP 17:

*” Wajar 9 tahun menerima siswa tergantung daya tampung yang ada bagi semua siswa tdak memandang dia keluarga mampu atau tidak mampu dan memberikan kepada orang tua bahwa anak itu harus mengikuti Wajar 9 tahun. Karena daya tampung kita terbatas yaitu pendaftaran 1200 siswa tapi hanya menerima 300 orang..”* (wawancara pada tanggal 16 Desember 2009).

Ini berarti minat masyarakat, untuk mengikuti wajib belajar cukup tinggi. Ini terlihat dari jumlah pendaftar secara keseluruhan sejak dimulai pendaftaran siswa baru sampai akhir batas penerimaan siswa baru, namun daya tampung yang ada di setiap sekolah negeri jumlahnya terbatas sehingga tidak semua anak tertampung di sekolah negeri. Hal ini dikarenakan daya tampung yang tersedia terbatas. Oleh karena itu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, bisa mendaftar di sekolah swasta yang sesuai dengan minat dan jumlah daya tampungnya. Dorongan hati keinginan yang tidak bisa terwujud inilah menjadikan keinginan anak tidak bisa merasa puas dan senang terhadap mengikuti pendidikan selanjutnya..

Upaya untuk menyalurkan minat siswa lulusan Sekolah Dasar yang ingin bersekolah di Sekolah Menengah Pertama negeri melalui informasi selebaran yang disediakan oleh dinas pendidikan ataupun sekolah swasta yang menyediakan dalam bentuk pamflet atau brosur. Ada juga sekolah swasta yang datang langsung ke sekolah dasar negeri dan swasta guna menyosialisasikan sekolahnya untuk para calon siswa baru.

Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagian sudah mempunyai sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah, model pembelajaran yang sudah bagus, dan fasilitas yang lengkap.

Sedangkan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pihak swasta mempunyai tantangan yang lebih besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam hal ini seperti, biaya operasional dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, pembangunan sarana prasarana dalam pembelajaran, pembayaran gaji guru dan tenaga-tenaga kependidikan, serta biaya administrasi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karenanya bagi sekolah-sekolah swasta selalu menerapkan bentuk pungutan dari dana masyarakat calon para orang tua siswa dalam istilah nama sumbangan awal tahun biaya pendidikan yang diterangkan pada saat mereka mendaftar. Hal ini mungkin yang memberatkan orang tua bila menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga mereka lebih memilih tidak menyekolahkan anaknya karena kemampuan orang tua yang terbatas.

### 5.3. Faktor-faktor penyebab lulusan Sekolah Dasar tidak bersekolah

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama menggunakan teori partisipasi yang diungkapkan oleh Chambers (1992) dalam Kumar (2001) yang membagi analisa dengan menggunakan metode terkait ruang, yaitu faktor sosial, ekonomi dan metode terkait waktu, yaitu faktor budaya

#### 5.3.1. Faktor Sosial

Kondisi sosial meliputi kondisi keluarga, pengertian orang tua serta faktor masyarakat dan teman . Hal ini menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekolah.

##### 5.3.1.1 Faktor Keluarga

###### 5.3.1.1.1. Cara Orang Tua Mendidik

Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi minat belajar anak menurun sehingga menyebabkan kurang/tidak berhasil dalam belajarnya. Karena itu, meskipun mereka sebagian besar termasuk keluarga kecil, namun karena peranan ayah sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah, secara konvensional ayah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling dominan memegang kendali keluarga hal ini

Bila dicermati ayah tidak dapat memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga dan menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya apakah mereka ingin melanjutkan sekolah atau tidak. Sebagai kepala keluarga, mereka tidak memberikan peraturan-peraturan yang cukup keras untuk mendidik anak-anaknya. Mereka hanya memberikan motivasi dan pengarahan kepada anak-anaknya. Di samping itu peran kakak-kakaknya yang sudah bekerja memberikan tambahan pengertian tentang hal tersebut, sedangkan hal yang diterima bagi anak-anak tersebut mereka menyadari akan keterbatasan keluarga. Pada waktu mereka bersekolah, mereka tidak mempunyai motivasi tinggi untuk belajar karena adanya keterbatasan, maka mereka tidak banyak berprestasi tetapi selalu naik kelas. Hal ini dapat dilihat dari penuturan berikut:

*“.....saya menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak saya. Saya hanya memotivasi tapi kakaknya sering bertanya kepada Ridwan mau jadi apa kalau tidak mau belajar. Mereka sering mengarahkan adiknya..”* (wawancara pada tanggal 7 Desember 2009).

Melihat kenyataan di atas sangatlah disayangkan betapa kecilnya dan mudahnya bahwa mendidik itu seolah-olah hal yang mudah untuk dilakukan, padahal itu sangat salah. Mendidik adalah salah satu ungkapan hati bagaimana cara merubah ke hal yang baik yang melalui bentuk nasehat, bimbingan, maupun arahan baik dalam tingkah laku maupun dalam bentuk perbuatan kita yang tentunya dapat berguna kepada dirinya maupun orang lain. Orang tua sangat erat hubungannya biasanya mengarahkan mendidik anaknya di dalam rumah misalnya tentang, agama, etika, sopan santun. Bagaimana anak bisa menjalankan kewajibannya beribadah sesuai agama yang dianutnya. Atau diberikan nasehat tentang adanya memiliki sikap sopan santun, hormat menghormati kepada seseorang yang dituakan dan sebagainya.

Cara orang lain juga berbeda-beda dalam menerapkan dalam mendidik anak, masih ada yang diserahkan kepada orang lain dalam keluarga yang dianggap lebih tua misalnya neneknya atau kakeknya. Hal ini semata-mata orang mempunyai pandangan hidup, bahwa yang diterapkan nenek atau kakeknya dapat dianggap lebih berhasil dibandingkan orang tuanya sendiri.

Bagi orang tua yang merasa tidak mampu dalam mendidik anaknya ada juga yang masih mengaharapkan kehadirannya para dermawan yang bisa dianggap sebagai orang tua asuh. Mungkin kehadiran orang tua asuh disini dapat membantu meringankan sekaligus dapat membimbing anak dalam hal pendidikan untuk proses masa depan mereka. Orang tua berharap bila anaknya sudah dewasa dan sudah mandiri bisa membantu juga kepada orang lain sebagai balasan rasa kasih sayang, mempunyai rasa tolong menolong dan dapat membantu kehidupannya .

Ada keinginan orang tua mendidik anak melalui lembaga seperti tempat kursus-kursus yang mengarah pada kemampuan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki anaknya seperti, kursur montir, menyetir mobil, dan lain-lain. Harapan yang ingin dicapai disini adalah bagaimana mengeluarkan biaya pendidikan lebih sedikit tetapi anak tetap terawasi dengan mendapatkan nilai pendidikan melalui jalur yang relati singkat. Bentuk pendidikan ketrampilan dan keahlian disini diharapkan mampu menjawab dan menghasilkan penghasilan sesuai harapan.

Dalam mendidik anak yang tidak sekolah, peran orang tua ada yang ingin memasukkan ke pondok pesantren, orang tua juga berharap bila kelak sudah berhasil anak tersebut mempunyai nilai-nilai agama yang diharapkan sebagai pedoman hidup yang dapat berguna bagi dirinya juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bagi anak yang tidak memiliki kemampuan minat belajar, peran orang tua dalam mendidik anaknya adalah dengan mengarahkan membimbing untuk dapat membantu peran orang tua bekerja dirumah.

#### 5.3.1.1.2 Relasi antar Anggota Keluarga

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi antar orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi dengan kebencian, sikap terlalu keras, ataukah sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya.

Hubungan antar anggota keluarga berjalan dengan baik bahkan saling membantu untuk adik-adiknya secara moril dan materil. Secara moril, mereka

mendukung semua kegiatan positif yang dilakukan oleh adiknya dengan memberikan motivasi. Kadang-kadang ketika mereka mempunyai waktu senggang atau sedang libur bekerja, mereka membantu adiknya belajar, paling tidak mendorong mereka untuk belajar, baik itu membaca buku-buku pelajaran maupun membaca majalah-majalah yang ada. Mereka juga memberikan pengarahan kepada adiknya apa yang akan mereka hadapi kelak bila mereka tidak belajar. Mereka pun kadang-kadang berlatih olahraga bersama, dalam hal ini mereka mempunyai hobi yang sama yaitu bermain sepak bola. Dari hobi bermain sepak bola inilah mereka mengikuti turnamen-turnamen antar RT, RW, kelurahan bahkan kecamatan. Berikut ini adalah keterangannya:

*“.....dia sudah mempunyai kapasitas atau keterampilan bermain bola dan guru serta kepala sekolah mendukung sekali dengan membawa mereka ke turnamen-turnamen.....”*

Dukungan secara materil pun diberikan kepada adik-adik mereka dengan membiayai biaya pendaftaran klub sepak bola atau pun hanya sekedar memberikan uang jajan. Hal yang penting dalam menjaga dan menjalin di lingkungan keluarga adalah adanya hubungan komunikasi yang harmonis antara orang tua, dan anak-anaknya. Satu sama lain harus merasakan susah atau senangnya dalam lingkungan hidup satu keluarga. Jalinan inilah yang menjadikan bentuk suatu keluarga yang harmonis. Seperti yang dituturkan berikut ini:

*“.....tetapi sekarang dia sekolah bola di Pamulang, dia latihan dua Minggu sekali. Biaya pendaftaran 100 ribu dan biaya kursusnya 20 ribu satu bulan...”*

#### 5.3.1.1.3 Suasana Rumah

Suasana rumah yang gaduh/ramai tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tenteram. Karena dengan suasana rumah dari jawaban yang tenang dan tenteram selain anak betah tinggal di rumah, anak akan dapat belajar dengan baik karena berminat belajar. Suasana rumah

tergantung dari jumlah keluarga yang ada yang mempunyai keluarga kecil dan ada yang banyak. Berikut ini adalah keterangannya:

*“.....semuanya masih tinggal di sini. Bahkan anak saya yang pertama juga tinggal disini dengan keluarganya.....”*

Bila dicermati bila dalam sebuah rumah dihuni oleh banyak anggota keluarga yang tinggal bersama di dalamnya, padahal rumah tersebut tidak terlalu besar untuk menampung mereka semua di dalamnya, maka suasana rumah terlalu ramai dan kurang nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Hal ini yang membuat anak kurang termotivasi untuk belajar karena suasana tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas belajar. Pada saat lulus Sekolah Dasar anak tersebut tidak berminat untuk melanjutkan sekolah.

Memang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sangatlah penting, disamping nyaman juga harus memenuhi unsur yang memenuhi unsur kesehatan, rumah itu juga harus kokoh. Faktor yang penting dalam memiliki suasana rumah yang nyaman adalah, sesuai dengan kegunaan baik bentuk ukuran besar kecilnya rumah, tetapi juga harus memperhatikan jumlah orang yang akan menempatinnya.

#### 5.3.1.1.4 Pengertian Orang Tua

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas dirumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, sehingga orang tua wajib memberi pengertian dan bimbingan serta membangkitkan minat dan semangat belajar anaknya.

Bila dilihat orang tua cukup memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Orang tua mendorong dan memberi motivasi kepada anak-anak mereka untuk belajar walaupun mereka sudah tidak bersekolah lagi.

Bentuk dukungan dan motivasi orang tua terhadap anak mereka berupa memberikan pengertian kepada anak-anak mereka dengan memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran agar mereka mempunyai bekal berupa keterampilan ataupun keahlian khusus agar mereka mempunyai suatu pegangan di masa yang akan datang. Hal ini penting karena ini sangat membantu dalam mencari pekerjaan walaupun pendidikan mereka tidak tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman informan itu sendiri. Seorang informan hanya sekolah sampai kelas

dua SMP tetapi karena mempunyai keterampilan, maka mudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang didapatpun cukup bagus, yaitu di sebuah perusahaan otomotif Jerman.

Dari informasi lain pun dapat dilihat bahwa anaknya yang putus sekolah bisa mendapat pekerjaan dengan mudah karena mempunyai keterampilan, misalnya merangkai bunga. Dengan bekal keterampilan tersebut dapat bekerja di sebuah toko walaupun hanya bersekolah sampai kelas lima SD. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak informan yang lain.

#### 5.3.1.2.. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya seseorang dalam masyarakat.

##### 5.3.1.2.1 Kegiatan dalam Masyarakat

Kegiatan dalam masyarakat menguntungkan terhadap perkembangan pribadi anak tetapi jika mengikuti kegiatan terlalu banyak di masyarakat dan tidak dapat mengatur waktunya, maka waktu belajarnya akan terganggu. Jika memilih kegiatan yang ada di masyarakat, maka seharusnya memilih kegiatan yang mendukung belajar.

Masyarakat di lingkungan tersebut cukup bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut cukup positif. Ini dapat terlihat, bila sebuah informasi disampaikan hanya pada beberapa orang di lingkungan tersebut, maka informasi tersebut akan sampai pada warga yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada informasi dari pihak RT atau RW tentang sekolah paket A atau paket B. Walaupun warga masyarakat tidak diberikan pengarahan secara formal atau diundang untuk menghadiri acara pertemuan, maka informasi tentang sekolah paket A atau B tersebut akan sampai ke warga masyarakat yang lain walaupun secara lisan.

Kegiatan lain yang dapat dijumpai dalam masyarakat tersebut cukup bagus. Ini dapat dilihat dari wawancara dengan informan bahwa masyarakat di sana sering mengadakan turnamen-turnamen antar RT atau RW, misalnya turnamen sepak bola, bulutangkis dan lain-lain. Hal ini bagus untuk diikuti oleh anak-anak

dan orang tua di lingkungan tersebut karena mendukung dan memotivasi mereka agar dapat berprestasi di bidang non akademik.

#### 5.3.1.2.2. Teman Bergaul

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul lebih cepat masuk dalam jiwa anak dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap dirinya, sebaliknya teman bergaul yang tidak baik, berpengaruh buruk terhadap dirinya.

Agar dapat belajar dengan baik, maka perlu diusahakan agar memilih teman bergaul yang baik-baik dan perlu pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana. Teman bergaul sangat mempengaruhi apalagi kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan dan olah raga.

Sebagian besar anak-anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah lagi meluangkan waktu bermainnya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan informan. Mereka menggunakan waktu bermainnya dengan berlatih sepak bola dengan teman-temannya. Ini cukup positif mengingat teman-teman mereka adalah anak yang juga tidak melanjutkan sekolah. Jadi mereka mempunyai wadah untuk mengasah keterampilan mereka dalam bidang ini.

Hal lain dalam berteman atau memilih teman sebagai salah satu alternatif sebagai tempat menyampaikan keinginan kita juga diharapkan bisa melakukan bentuk memilih teman sebagai hubungan dalam berdiskusi diharapkan bisa lebih bermawas diri supaya sejalan ide pemikiran sehingga bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi.

#### 5.3.1.2.3 Mass Media/ informasi

Yang termasuk dalam mass media adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain sedangkan mass media akan membawa berbagai informasi baik informasi hiburan, olah raga/sport, ekonomi maupun pemerintahan dan sebagainya

Mass media ataupun informasi akan memberi pengaruh baik terhadap seseorang juga dapat memberi pengaruh negatif jika tidak ada kontrol dan

pembinaan orang tua. Informasi sangat terkait erat dengan keberhasilan suatu program-program pemerintah maupun informasi yang lain, seperti mengetahui tempat sekolah informal atau tempat-tempat kursus lainnya. Banyak warga masyarakat yang tidak tahu tentang sekolah informal atau tempat kursus ataupun tempat yang membuat mereka terampil seperti program yang diinformasikan tentang sekolah paket A dan paket B, kadang-kadang informasi itu datanginya lewat dari mulut ke mulut ataupun secara lisan. Informasi yang didapat berasal dari anak-anak usia 13 -15 tahun.

Hal tersebut terjadi karena peran mass media di lingkungan ini tidak digunakan secara optimal. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah ini mempunyai kegiatan yang cukup padat, yaitu berdagang dan bertani. Sehingga mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi dari mass media. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan yang ketika ditanya tentang program wajib belajar, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Padahal informasi tentang hal itu bisa didapat melalui televisi, surat kabar, majalah dan lain-lain. Sebagian dari informan lebih tertarik menonton sinetron ataupun program televisi lainnya yang dapat menghibur mereka. Seperti yang dikatakan berikut ini:

*“.....Saya juga tidak pernah mendengar informasi tentang hal tersebut melalui radio maupun televisi karena saya jarang menonton televisi .....”*

Untuk anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah tersebut, mereka lebih senang menonton acara olahraga, sinetron anak, dan juga acara hiburan lainnya. Mereka jarang sekali menonton acara yang menyangkan kegiatan kognitif seperti cerdas cermat dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena sosialisasi tentang program wajib belajar sembilan tahun tidak sampai kepada mereka seperti yang dikatakan oleh Ridwan bahwa ia tidak pernah mendengar tentang program wajib belajar karena di sekolah tempat ia belajar dulu tidak pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut. Padahal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak menyekolahkan anaknya karena alasan ekonomi karena sebenarnya pemerintah melalui sekolah sudah memberikan keringanan atau kemudahan untuk mereka bila menyekolahkan anaknya.

#### 5.3.1.2.4 Bentuk Kehidupan Masyarakat

Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga berpengaruh terhadap belajar. Jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, sehingga anak berbuat seperti orang-orang yang ada di lingkungannya. Pengaruh ini cenderung memberi semangat dan membangkitkan minat untuk belajar lebih giat.

Di Kota Tangerang Selatan terdapat banyak sekolah, terdiri dari 17 SMP negeri dan 114 SMP swasta. Sebenarnya hal ini sangat baik bagi masyarakat di lingkungan tersebut karena jarak antara rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh. Seharusnya hal tersebut mendorong mereka untuk menyekolahkan anaknya.

Bila dilihat dari perbandingan antara jumlah sekolah negeri dan swasta memang di Kota Tangerang Selatan lebih banyak terdapat sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Untuk masuk ke sekolah negeri, siswa lulusan Sekolah Dasar harus bersaing dengan banyak siswa lainnya. Oleh karena itu, para orang tua harus mempunyai biaya yang cukup jika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. hal ini dapat dilihat dari penuturan berikut:

*“.....Untuk SMP negeri 79, swasta 116 jumlahnya 133. Nah ini untuk mengatasi persoalan pemerataan tadi yaitu agar anak-anak usia sekolah tertampung di sekolah. Di sekitar sini ada sebuah komplek perumahan yaitu Pamulang II yang di sekitarnya terdapat 8 SMP swasta karena kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah.....”*  
(wawancara pada tanggal 14 Desember 2009).

#### 5.3.2.. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menurut Soetandyo Wignyoebroto merupakan suatu hak antara lain memperoleh kehidupan yang layak yang bisa ditampilkan dalam keadaan ekonomi keluarga, berpartisipasi dalam pembangunan dapat tergambarkan pada pekerjaan keluarga yang berupa keadaan ekonomi keluarga.

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah siswa yang tidak mampu. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam

mempengaruhi anak usia sekolah SMP untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekolah. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa salah satu fungsi keluarga adalah memenuhi kebutuhan nafkah atau ekonomi anggota keluarganya. Kebutuhan ekonomi ini seringkali dioperasionalkan ke dalam kebutuhan sosial dasar, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya disebabkan oleh berbagai faktor.

Dalam upaya keluar dari masalah, keluarga mengembangkan suatu strategi dari kondisi tersebut, dimana keluarga tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi informal. Jenis kegiatan ekonomi informal dimaksud seperti pemulung, menyemir sepatu, mengamen,

#### 5.3.2.1 Keadaan Ekonomi Keluarga.

Keadaan ekonomi keluarga berhubungan erat dengan belajar anak. Anak memerlukan pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain. Mereka juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar tersebut hanya dapat dipenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang.

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu atau minat anak untuk belajar menurun atau hilang sama sekali. Bahkan anak sampai bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya sehingga ia tidak dapat belajar karena .lelah, dan tidak menutup kemungkinan keadaan ini menjadikan suatu motivasi baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya sukses.

##### 5.3.2.1.1 Pendidikan Orang Tua

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Walaupun kehidupan masyarakat kita sangat luas namun tuntutan kebutuhan kita akan ilmu pengetahuan sangat diharapkan. Dalam mengatasi kesulitan permasalahan-permasalahan ternyata kita selalu bingung untuk mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Terlepas dari permasalahan kesulitan hidup, kita

juga masih dituntut bagaimana menghadapi kehidupan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana dalam kehidupan keluarga, orang tua mempunyai peranan yang besar dalam bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan yang ada, baik terhadap anak maupun keluarga.

Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar

Keberhasilan atau kesulitan dalam menghadapi masalah ini semua tidak terlepas dari apa yang ada pada diri kita dalam menerapkan cara yang tepat dan sesuai dengan masalah itu sendiri. Sesuai tingkatan permasalahan mungkin tingkatan pendidikan akan mempengaruhi dalam memecahkan suatu masalah. Tingkatan pendidikan orang tua yang tinggi dalam mengukur tingkat pendidikan kepada anaknya, diharapkan juga akan menghasilkan suatu pengetahuan anak yang lebih tinggi, namun sebaliknya bila tingkatan pendidikan orang tua yang masih rendah juga mempengaruhi tingkat pengetahuan anak dalam memperoleh pendidikan. Sekarang sudah berbeda dalam kehidupan masyarakat kita, karena adanya pengaruh dari modernisasi keadaan. Pengaruh yang cepat dari ilmu teknologi informasi juga menambah daya tarik tersendiri terhadap masyarakat untuk mengikutinya. Transformasi dunia pendidikan mudah didapat, dan dilihat dalam kehidupan masyarakat.

Bagi orang tua yang tidak mampu dalam membiayai kebutuhan anaknya dalam memperoleh pendidikan, sekarang lebih mudah bagaimana menerapkan pola yang sesuai atau yang tepat kepada anaknya baik melalui bakat maupun minat yang dimilikinya. Seperti halnya pendidikan yang dimiliki orang tua yang masih rendah, anaknya juga tidak dituntut yang berat namun mereka diterapkan pola bagaimana cara mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa merepotkan kepada orang tua. Peran orang tua yang menerapkan dalam kehidupan yang sangat disiplin dan tanggung jawab yang besar kehidupan anak juga lebih baik karena sudah terbiasa dalam mengatasi kehidupan yang lebih keras.

Pendidikan yang pernah ditempuh orang tua sampai tamatan SD tidak melanjutkan sekolah bervariasi, mulai dari pernah sekolah SD namun tidak tamat sampai lulus SMP. Penyebab mereka tidak sekolah pun bervariasi, mulai dari

yang tidak mempunyai biaya karena orang tua mereka tidak mampu, ada juga yang orang tuanya mampu tetapi mereka tidak berminat melanjutkan sekolahnya sampai mereka berhenti karena menghadapi persoalan keluarga. Berikut adalah keterangan dari orang tua: “*Saya lulus SD. Karena ga punya biaya saya ga melanjutkan sekolah.*”

Konsep pendidikan dasar sembilan tahun yaitu enam tahun bersekolah di SD ditambah tiga tahun bersekolah di SMP menggambarkan bahwa pendidikan terendah yang harus dimiliki masyarakat adalah tingkat SMP. Jika menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP menjadi ukuran pencapaian pendidikan terendah, maka orang tua yang hanya lulusan SD dan tidak melanjutkan sekolah tergolong pendidikan rendah. Hal ini berkaitan dengan tingkat aspirasi pendidikan anak.

#### 5.3.2.1.2 Pekerjaan Orangtua

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keadaan ekonomi keluarga mereka masih di bawah rata-rata karena pekerjaan mereka berdagang yang penghasilannya kurang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, padahal peran isteri dirumah juga sudah membantu dalam mendukung penghasilan keluarganya.

Berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang ada dalam mencukupi kebutuhan sangatlah berbeda cara melakukannya. Ini terlihat dari aktifitas yang ada dalam keseharian yang dilakukan baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Peran kehidupan yang berbeda-beda akan membedakan bentuk cara hidup yang berbeda-beda pula, ini akan terlihat dari penghasilan mereka dan gaya hidup yang ia lakukan. Kehidupan yang sudah baik akan berpengaruh pada tingkat kehidupan mereka seperti, menjaga kebersihan pribadi, maupun menjaga lingkungan tempat tinggalnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap orang tua juga akan terlihat dari bentuk kehidupan dirumahnya. Seseorang yang mempunyai pekerjaan pedagang keliling akan terlihat sarana penunjang dirumahnya seperti gerobak dorong ataupun alat pikulan. Seorang petani juga mempunyai sarana penunjang yang sama dalam menunjang pekerjaannya, namun demikian ada beberapa hal yang berbeda bahwa mayoritas masyarakat di sini mempunyai latar belakang

pekerjaan yang sama yaitu antara pedagang dan petani. Dalam bentuk masyarakat seperti ini ternyata membuat generasi penerus akan terbentuk dengan sendiri karena peran pekerjaan orang tua yang sama bentuknya. Pola kehidupan semacam ini sulit diubah karena orang tua mempunyai peranan yang cukup besar terhadap anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Satiri: *“Masyarakat di sini sebagai petani dan pedagang”*

Peran pekerjaan orang tua mudah dilakukan oleh anak-anaknya sebagai pengganti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran istri sebagai ibu rumah tangga sudah diabaikan karena tuntutan kehidupan, hal ini terlihat dari kebiasaan yang dilakukan dirumah. Membantu pekerjaan suami menjadikan dasar untuk menambah penghasilan, anak-anak dijadikan alat bantu dalam bekerja misalnya menjaga adiknya yang masih balita ataupun sekedar membantu mencuci piring dan sebagainya, namun demikian masih banyak contoh bentuk peran orang tua yang menerapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Aturan peran orang yang tidak jelas kepada anak-anaknya dapat membuat anak menjadi bingung apa yang harus ia lakukan setiap harinya. Peran orang tua ada yang tidak tahu kebiasaan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di rumah. Kesibukan peran orang tua yang padat menjadikan anak yang tidak bisa kreatif dan aktif apa yang harus ia lakukan.

Penghasilan orang tua yang kurang mencukupi menjadikan segala kebutuhan hidupnya menjadikan sangat terbatas. Orang tua hanya bisa mencukupi dari segi makan adapun faktor lain belum tersedia. Tidak tersedianya suatu biaya dari orang tua menjadikan peranan fungsi orang tua bertambah berat terhadap keluarganya. Secara psikologis anak akan merasakan beban hidupnya semakin berat dalam menghadapi masa depannya. Kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat seperti ini sangat terasa dalam kehidupan peran orang tua di dalam kehidupan keluarga hidup menjadikan sulit. Ini tercermin seperti pola hidup yang tidak sehat seperti menjaga kesehatan pribadi ataupun sanitasi rumah tempat tinggalnya.

Penerapan yang dilakukan masyarakat seperti ini semestinya harus mendapatkan perhatian kita semua, apa arti peran orang tua dalam memberikan peran tanggung jawabnya dalam melakukan aktifitasnya di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam lingkungan keluarga. Kita harus sadar apa yang

harus dan mesti dilakukan dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari keterangan tersebut, ternyata jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi anak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

#### 5.3.2.1.3 Tingkat Pendapatan Orangtua

Pekerjaan yang dilakukan oleh para orang tua dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bervariasi hal ini terlihat dari pendapatan yang diterimanya. Pendapatan yang diterima ada yang berdasarkan, harian, mingguan ataupun bulanan. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah, jualan ditempat, jualan keliling ataupun bekerja di toko.

Tingkat pendapatan orang tua diukur berdasarkan patokan Badan Pusat Statistik. Lebih kecil dari Rp 75.000,- tergolong miskin, bahkan sangat miskin, antara Rp 76.000,- sampai Rp 150.000,- tergolong tidak miskin, antara Rp 151.000,- sampai Rp 250.000,- tergolong lebih dari cukup, dan lebih besar dari Rp 250.000,- tergolong kaya. Berdasarkan kategori itu status ekonomi sebuah keluarga dikelompokkan setelah dikonversikan dengan jumlah anggota keluarga.

Bila dicermati diperoleh keterangan bahwa para lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah berasal dari keluarga yang tidak miskin. Tidak miskin di sini bukan berarti kaya. Seperti keterangan berikut ini:

*“Untuk satu orang ada yang membayar 100 ribu perbulan, kalau yang anaknya les diluar ditambah biayanya 150 ribu perbulan.”*

Sebenarnya permasalahan dalam faktor ekonomi yang menyebabkan siswa lulusan sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah dapat diatasi dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan. Jenis bantuan tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beasiswa Siswa Berprestasi, Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS), subsidi silang dan juga sumbangan sukarela untuk pendidikan.

### 5.3.3. Faktor Budaya

Hak-hak dalam faktor budaya Soetandyo Wignyosoebroto meliputi memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya, memperoleh pendidikan untuk menumbuh kembangkan bakat-bakat dalam kehidupannya pribadi. Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

#### 5.3.3.1. Persepsi

Orang tua mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kemauan dan kemampuan anak untuk belajar di sekolah. Ada orang tua yang berpendapat bahwa anak belajar di sekolah atas kemauan mereka sendiri, ada yang mengatakan anaknya jarang ke sekolah dan ada juga yang mengatakan mereka tidak mau bersekolah tetapi orang tua mengatakan bahwa anak berkeinginan untuk sekolah tetapi tidak ada biaya.

Dilihat dari persepsi orang tua tentang sekolah, mereka beranggapan sama bahwa sekolah itu merupakan hal yang penting untuk masa depan anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak begitu penting karena menurut mereka jika anak sudah mempunyai keterampilan, mereka juga bisa bekerja. Di daerah tempat mereka tinggal juga banyak masyarakat yang hanya lulusan SD atau SMP atau putus sekolah. Hal ini pun disebabkan karena masalah biaya.

Ada orang tua yang mempunyai persepsi tentang anak perempuan bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Bila anak perempuan mereka bersekolah tinggi, maka akan mudah mendapat pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Mereka mengatakan anak perempuan mereka diusahakan agar bersekolah tinggi karena kesempatan untuk mendapat pekerjaan lebih besar bila melihat kondisi sekarang. Mereka akan melakukan apa pun untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Satiri:

*“Ya karena untuk anak perempuan lebih mudah mendapat pekerjaan, kesempatannya bekerja lebih besar daripada anak laki – laki. Oleh*

*karena itu saya berusaha keras agar anak saya bisa melanjutkan sekolah yang memadai karena semakin lama biaya semakin mahal.”*

Ada juga yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus bersekolah tinggi agar mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mudah mendapat pekerjaan. Hal ini dilakukan agar setelah mendapat pekerjaan, mereka dapat membantu orang tua dan keluarga.

Pandangan lain orang tua terhadap anaknya ternyata juga masih ada yang berharap banyak kepada salah satu anak yang paling tua, dimana anak yang paling tua mempunyai peranan dan tanggung jawab kepada adik-adiknya, atau peran yang lain adalah diharapkan dapat membantu kelangsungan kondisi ekonomi keluarganya. Impian atau harapan masa depan sangat perlu untuk memberikan motivasi kepada kehidupan harapan menjadi impian yang ingin diraih untuk masa depannya sehingga akan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar

#### 5.3.3.2 Pengetahuan

Pengetahuan orang tua terhadap pendidikan cukup besar. Mereka mengetahui betapa pentingnya sebuah pendidikan bagi kehidupan anak-anak mereka kelak tetapi mereka memilih keputusan anaknya tidak melanjutkan sekolah setelah lulus Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya. Pilihan keputusan tersebut diperkuat oleh pertimbangan bahwa materi yang didapatkan di sekolah dasar sudah cukup untuk modal kerja. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan orang tua: *“Pendidikan merupakan hal yang bagus karena pendidikan itu membantu anak supaya pintar”*

Dilihat dari hal tersebut, tampaknya ada pergesaran pengetahuan orang tua tentang makna pendidikan dari konsep sosial dan budaya menjadi konsep ekonomi. Orang tua lebih melihat keberhasilan pendidikan dari ukuran ekonomi dan ketenagakerjaan. Orang tua dalam mengarahkan kepada anaknya tentang pengetahuan sangat kurang karena faktor pengetahuan lingkungan tempat mereka

juga mempengaruhi proses seseorang menjadi lambat. Rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah kebanyakan lulusan sekolah dasar.

Pengetahuan mereka baru sampai bisa membaca atau mengenal huruf, sekalipun ada yang lulusan Sekolah Menengah Pertama keadaan lingkungannya juga tidak berbeda banyak. Semua ini akan berpengaruh pada pola pendidikan anaknya karena setelah pulang sekolah, dirumahpun tidak ada yang membimbing atau memberikan pengajaran sehingga anak akan belajar bila berangkat ke sekolah bersama guru atau teman sebangkunya. Kurangnya pengetahuan mereka juga sarana belajar mereka yang tidak memadai, tidak tersedianya buku-buku bacaan di sekolah yang bisa di pinjam untuk dibawa pulang ke rumah. Di rumahpun juga tidak ada sumber belajar yang memadai. Mereka hanya memiliki buku dan alat tulis sedangkan buku pelajaran tidak ada. Di saat tidak ada kegiatan mereka hanya menonton televisi yang isinya masalah hiburan baik maupun berita yang ditayangkan televisi. Pengetahuan anak lebih cepat bertambah bila menonton hiburan seperti acara sinetron. Pemahaman pengetahuan akan lebih cepat bila melihat acara hiburan.

Pengetahuan dalam dunia pendidikan hanya sebatas informasi kapan kenaikan kelas, dan kapan ada kelulusan sekolah, sedangkan untuk mengikutinya tidak ada karena tidak adanya komunikasi antara anak yang sekolah kepada yang tidak melanjutkan sekolah.

#### 5.3.3.3. Sikap

Adapun prilaku sikap yang ditunjukkan orang tua terhadap anaknya dalam belajar adalah sangat besar, walaupun dasar orang tua tidak mempunyai kemampuan menyediakan biaya. Penanganan orang tua terhadap anak hanya sebatas sikap prilaku orang tua, seperti bentuk nasehat, bimbingan dalam soal sopan santun, sika prilaku dalam menjalankan ibadah ataupun bentuk cara hidup bergotong- royong.

Sikap menurut Greenstein ada tiga (Muhammad Asfar, 1996) yaitu:

- a. Sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu objek diberikan berasaskan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.

- b. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.
- c. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik bathin atau tekan psikis yang mungkin berwujud kepada mekanisme pertahanan diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

Etika orang tua dalam memberikan pembimbingan model belajar anak sebatas memberikan ingatan kepada anak, kapan harus belajar, kapan untuk bermain, dan kapan membantu kepada orang tua. Di sisi lain anak juga dituntut untuk dapat bersikap yang lebih baik dalam pergaulan baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, ataupun kepada masyarakat tempat mereka tinggal

Bentuk pemahaman dalam belajar juga berbeda-beda, ada yang hanya dengan membaca, menonton televisi. Anak mempunyai sikap perilaku yang berbeda-beda. Ini terlihat dari gaya bercanda atau di saat berkumpul sesama temannya. Yang paling terlihat di saat diadakan wawancara dengan mereka. Ada yang berbicara dengan bercanda, tidak lancar dalam menjawab, ada juga yang lancar dalam menjawab pertanyaan. Keseriusan mereka terlihat juga di saat kegiatan apa yang mereka sukai pada saat wawancara. Hobi mereka masih dalam bentuk permainan seperti, bermain sepak bola. Sepertinya sikap perilaku mereka sangat kuat dalam bermain, seperti bermain sepak bola, walaupun mereka tidak ada yang melatih atau yang membimbingnya.

Sikap orang tua terhadap anaknya dalam bermain ini ternyata juga dibiarkan artinya orang tua tidak melarang kegiatannya, orang tua juga menyerahkan kemauan anak dengan asumsi bila anaknya rajin dan pintar bermain sepak bola mungkin nanti dapat mendapatkan pekerjaan. Dengan kebersamaan sesama temannya anak-anak itu selalu berkumpul dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sikap orang tua dengan anak berolah raga dimungkinkinkan tetap terpelihara kesehatannya, juga akan jauh dari kegiatan yang negatif. Jadi sikap orang tua terhadap pendidikan lebih banyak mengharapkan akan lebih baik mempunyai bentuk keterampilan sesuai keahlian yang dimilikinya, walaupun dengan bermain sepak bola.

Sikap orang tua terhadap pendidikan pada umumnya menginginkan adanya kemudahan atau keringanan dalam hal bersekolah. Padahal sebenarnya pemerintah kota Tangerang Selatan sudah memberikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah agar semua siswa yang ingin melanjutkan sekolah dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah. Berikut keterangan dari orang tua: *“Untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bisa merasakan sekolah, mendapatkan kehidupan yang lebih layak”*

#### 5.4 Partisipasi

Dalam kaitannya dengan partisipasi, sebenarnya masyarakat mempunyai minat dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Namun, hal ini sulit untuk diwujudkan karena mereka mempunyai hambatan dalam masalah ekonomi. Berikut penuturan dari orang tua yang anaknya tidak sekolah:

*“...ketika dia sudah mau sekolah, saya sudah tidak bekerja lagi sehingga tidak mempunyai biaya lagi untuk memasukkan dia sekolah.*

Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena menurut pihak sekolah, setiap anak bisa melanjutkan sekolah karena mereka akan diberikan bantuan dana berupa beasiswa, baik itu BOS pusat, maupun BOS daerah. Seperti penuturan dari Bapak M dari SMP 17:

*”.....Kalau misalnya karena faktor biaya, banyak sekolah yang menyelenggarakan subsidi silang, sudah ada sekolah gratis dan bantuan beasiswa dari pemerintah seperti BSM, bantuan siswa miskin, tapi tetap saja anak tidak mau sekolah.*

Pendapat tersebut juga didukung oleh dinas pendidikan kota Tangerang Selatan yang mengatakan bahwa bagi keluarga yang tidak mampu, mereka bisa bersekolah karena pemerintah sudah mengalokasikan bantuan beasiswa.

White (1996) dalam Ternieden (2009) mengatakan *“in reflecting on participation explains that I can serve a “broad range of interest”*. White menunjukkan bahwa dalam partisipasi terdapat dua faktor a) *who participates;*

and b) *what level*. Menurut white partisipasi masyarakat terbagi menjadi beberapa level:

1. *Normal participation*

Bentuk ini merupakan partisipasi yang sangat rendah. Misal masyarakat hadir dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan.

Kenyataan yang terjadi bahwa pola kehidupan yang ada sekarang masih ada yang kurang mengerti dari maksud pertemuan yang diselenggarakan. Ada saja yang menganggap tidak perlu. Kegiatan kehidupan yang bermacam-macam membuat tidak peduli lagi terhadap akan informasi. Dalam kehidupan masyarakat di sini adalah pengetahuan mereka tentang pentingnya pendidikan sudah cukup baik tetapi tidak wawasan mereka terbatas, misalnya mereka hanya berpikir bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Padahal pihak sekolah sudah berusaha untuk menyosialisasikan tentang pendidikan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari penuturan berikut:

*“.....mengadakan sosialisasi masyarakat melalui RT/RW dan jika orang tua ingin menyekolahkan anaknya kami persilakan untuk mendaftar.*

2. *Instrumental participation*

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam bentuk dukungan tenaga, materi atau dana.

Dalam hal ini masyarakat juga belum bisa berperan aktif. Mereka cukup sibuk bekerja mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tidak dapat berperan aktif untuk memberikan dukungan tenaga apalagi dana, seperti yang dikatakan oleh orang tua mereka:

*” .....itu pun dengan susah payah dengan membantu istri saya berdagang.....”*

3. *Representative participation*

Masyarakat berpartisipasi aktif tidak hanya dukungan tenaga, materi atau dana saja tapi juga terlibat dalam membuat rencana kegiatan.

Dalam hal ini juga masyarakat belum dapat berperan aktif. Bagi masyarakat yang berasal dari keluarga yang mampu, hal ini dapat dilaksanakan, karena mereka mempunyai kesempatan untuk membantu agar pendidikan dapat berjalan lancar.

Namun demikian, sebagai upaya berperan aktif dalam lingkungan, melalui komunitas berperan aktif dalam kegiatan . Hal ini menggambarkan, bahwa masyarakat tetap merasa bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan dan kenyamanan serta masa depannya

#### 4. *In Transformatif participation*

Masyarakat diberdayakan untuk mengelola, membuat keputusan-keputusan, dan menerapkannya dalam kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada umumnya sudah mendukung terhadap kebijakan pembangunan. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya nilai sosial budaya yang tidak mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan.

Dalam hal ini masyarakat tidak dapat membantu karena alasan ekonomi. Mereka tidak dapat berperan aktif dalam membuat keputusan karena mereka tidak aktif dalam organisasi.

Partisipasi harus dilandasi oleh kesadaran bukan karena paksaan. partisipasi akan menghasilkan sinergi dan manfaat dan akan dinikmati oleh semua orang yang berada dalam lingkungan organisasi ini. Partisipasi masyarakat pada dasarnya harus lahir dari rasa kebanggaan dan memiliki sekolah sehingga akan menghasilkan sebuah pengorbanan. Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari pendapat para birokrat, tetapi dari kepuasan masyarakat atau *stakeholder*.

### 5.5. Equality

Menurut Schiefelbein & Farrel (1982) yang dikutip oleh Suryadi dan Tilaar (1993), menggunakan landasan konsep pemerataan pendidikan (*equality of educational opportunity*) yang meliputi : (1) pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*) yaitu berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan; (2) pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (*equality of survival*) yang menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan; (3) pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*) yang menunjukkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan keterampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya; (4) pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*) yang menunjukkan keberhasilan pendidikan secara eksternal dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dikaitkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan adalah proses kehidupan yang berkait dengan masalah demokrasi yang memberi peluang bahwa setiap warga bangsa memiliki akses yang sama untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan, baik secara formal maupun informal harus bisa meningkatkan potensi masing-masing peserta didik dan tidak boleh diskriminasi.

Pendidikan yang ada sekarang ini belum dapat diketahui secara utuh oleh masyarakat setempat misalnya tentang ada informasi masalah bea siswa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bantuan operasional sekolah belum diketahui oleh para orang tua yang mempunyai masalah faktor ekonomi, hal ini disebabkan karena orang tua juga tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui secara lengkap. Hal lain adalah dari pihak sekolah dan pemerintah kota Tangerang Selatan tidak memberikan bentuk seperti penyuluhan kepada masyarakatnya secara optimal. Penyuluhan atau sosialisasi hanya diberikan

kepada momen-momen tertentu seperti, misalnya seperti Tangsel Fair, Acara masyarakat Kota Tangerang Selatan , pertemuan antar sekolah dan diskusi-diskusi lainnya. Seperti penuturan berikut ini:

*“ Untuk sampai kesana belum, bertahap, tapi melalui momen-momen tertentu sudah kita laksanakan, seperti pada acara Tangsel fair, pesta rakyat, yang belum lama ini diadakan. Jadi kita informasikan apabila Bapak kesulitan tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, jangan khawatir karena ada program bantuan untuk mereka.”*

Tentu saja sosialisasi seperti tersebut di atas hanya sampai pada golongan masyarakat tertentu. Masyarakat lapisan bawah belum mendapatkan informasi ini karena mereka tidak bisa mengikuti acara-acara tersebut.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia, walaupun usaha pengembangan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.

*Coleman* dalam bukunya *Equality of educational opportunity* mengemukakan secara konseptual konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaptar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Ace Suryadi, 1993). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Apabila dimensi-dimensi tersebut, yaitu *equality of access, equality of survival, equality of output dan, equality of outcome* menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya

menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.

Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi *equality of access*). Di samping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi *equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Program beasiswa ini semakin intensif dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar, hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Namun hal tersebut belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai masalah ekonomi karena mereka tidak mengetahui adanya informasi tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat bisa menikmati pendidikan, minimal sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Kusnets (1963) menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidakmerataan (*inequality*) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (*trickle down effect*). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (*trickle down effect*) tidak selalu terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar.

Pemerataan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Ada tiga permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia, walaupun usaha pengembangan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana utama untuk pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.

Kemajuan pendidikan dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk menangkap proses informatisasi dan kemajuan teknologi. Karena proses informatisasi yang cepat karena kemajuan teknologi semakin membuat kehidupan di dunia semakin luas. Hal ini berarti berbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidaknya tidak dapat

dilepaskan dari pengaruh kejadian dibelahan bumi yang lain, baik masalah politik, ekonomi, maupun sosial.

Sejalan dengan hal di atas, Tilaar (2004) mengatakan bahwa: Kesetiakawanan sosial umat manusia semakin kental, hal ini berarti kepedulian umat manusia terhadap sesamanya semakin merupakan tugas setiap manusia, pemerintah, dan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pendidikan bertugas untuk mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab setiap warga negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakat dan negara, juga umat manusia.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain; setiap manusia akan selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai segi kehidupan. Kesetiakawanan sosial yang merupakan bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran mempunyai peranan yang sangat kuat bagi individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya.

Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, kesetiakawanan sosial diwujudkan melalui interaksi antarmanusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai segi kehidupan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik budaya, dan sebagainya. Interaksi di bidang pendidikan dapat diwujudkan melalui interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat, guru dengan guru, guru dengan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak adanya interaksi antara siswa dengan masyarakat, guru dengan masyarakat. Dengan kata lain tidak ada interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan kota Tangerang Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan menurut Lodge dalam Ismaun (2007) adalah: *In the narrower sense, education is restricted to that functions, it's background, and it's outlook to the member of the rising generation, .....* *In the narrower sense, education*

*becomes, in practice identical with schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions.*

Dalam arti yang sempit, pendidikan hanya mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh, yang dalam prakteknya identik dengan pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi dan kondisi serta lingkungan belajar yang serba terkontrol. Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. (Syaiful Sagala, 2006).

Sementara itu Hamid Darmadi (2007) berpendapat pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu membentuk kemampuan individu mengembangkan dirinya yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu. Selanjutnya Dodi Nandika (2007) Pendidikan bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan karakter, moral, nilai-nilai, dan budaya peserta didik.

Pendidikan adalah membangun budaya, membangun peradaban, membangun masa depan. Kamus Besar bahasa Indonesia (1995) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik.

Selanjutnya, Sihombing dalam Ety Rochaety, dkk (2005) bahwa pendidikan mengandung pokok-pokok penting sebagai berikut: Pendidikan adalah proses pembelajaran, Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, Pendidikan berusaha mengubah atau mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku positif, Pendidikan merupakan perbuatan atau kegiatan sadar, Pendidikan berkaitan dengan cara mendidik, Pendidikan memiliki dampak lingkungan, Pendidikan tidak berfokus pada pendidikan formal.

Berdasarkan hal tersebut di atas pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan

satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk membangun masa depan bangsa. Jika menginginkan pendidikan dapat berjalan dengan baik, berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu bekerja sama secara optimal.

Di Kota Tangerang Selatan hal tersebut di atas belum berjalan dengan baik karena belum adanya kerja sama yang optimal antara pihak-pihak pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penuturan berikut:

*“Untuk sampai kesana belum, bertahap, tapi melalui momen-momen tertentu sudah kita laksanakan, seperti pada acara Tangsel fair, pesta rakyat, yang belum lama ini diadakan.”*

Persebaran fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama antar wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang tidak merata serta terbatasnya layanan pendidikan bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan fasilitas pendidikan mengakibatkan APK antarwilayah kecamatan yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari keterangan berikut:

*“Untuk di satu daerah mungkin sudah cukup merata tetapi untuk daerah lain belum tentu seperti di kecamatan Setu baru ada 1 SMPN. Di situ akan kita bangun sekolah...”*

### **5.6. Implikasi Kebijakan**

Seperti yang dikemukakan oleh William N Dunn (1994) kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dengan kata lain kebijakan publik merupakan keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat

Wajib belajar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 adalah hal sangat penting untuk dilaksanakan. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ditargetkan selesai pada tahun 2008/2009. Indikator utama penuntasan Wajar Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dari sisi jumlah siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan

layanan pendidikan terhadap sekitar 1.9 juta anak usia 13 – 15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/yang sederajat. Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program nasional tersebut.

Adapun tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini adalah :

1. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP, MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
2. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
3. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
6. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

Sasaran gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun ini adalah untuk:

1. Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13 – 15 tahun) yang belum belajar di SMP/MTs atau yang sederajat
2. Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat
3. Anak putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat

Dalam implementasi perjalanannya, program ini selalu mengalami kendala, misalnya masalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, kurikulum pendidikan, tidak sesuainya mutu lulusan sekolah, dan manajemen pendidikan itu sendiri. Di samping itu masih terlihat masyarakat yang tidak ada dan bersedia dalam persiapan mengikuti pendidikan. Hal ini terlihat karena faktor ekonomi. Hal inilah yang memberikan dampak langsung dengan semakin tingginya angka putus sekolah.

Untuk mengurangi permasalahan tersebut sekolah sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata mencerdaskan bangsa hendaknya lebih mewujudkan tujuan pendidikan secara nyata dan terus menerus dalam hal mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Dalam memandang kelanjutan pendidikan, peningkatan prestasi pendidikan harus ditingkatkan, peningkatan ini melalui proses pembelajaran di kelas. Hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi hendaknya bagi setiap warga negara harus dijamin oleh negara, sehingga orang tua cenderung akan memberikan informasi positif tentang dunia pendidikan bagi anak-anaknya kelak, yang akhirnya dapat menentukan pembentukan aspirasi pendidikan. Selain itu perlunya gerakan moral seperti menekankan pembiayaan ditingkat sekolah dasar serendah mungkin.

Faktor lain guna memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak dirumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha..

Permasalahan utama yang sebenarnya dalam menyukseskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun adalah bagaimana menjamin bahwa anak-anak yang telah

lulus sekolah dasar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, bukan SMP biasa, SMP terbuka atau melalui program paket B.

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa faktor ekonomi ini dalam hal penghasilan orang tua menjadi penyebab utama mereka tidak melanjutkan sekolah. Biaya hidup dirasakan masyarakat terasa mahal, terutama oleh sebagian besar penduduk dari masyarakat kurang mampu di perkotaan. Semua hal ini dapat dijadikan cerminan atas hubungan pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dan masyarakat lain seharusnya mempunyai andil yang besar untuk mengatasi masalah ini.

. Realitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah beserta jajarannya selama ini dirasakan masih belum sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pelayanan publik yang dirasakan di lingkungan Kota Tangerang Selatan.

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Selain hal itu dapat dikatakan pula bahwa pelayanan publik yang baik merupakan upaya menciptakan *good governance* dan *clean government*. Konsekuensinya pemerintah harus terus menerus mengupayakan untuk menjamin pemberian pelayanan dan perlindungan hak setiap anggota masyarakat dalam pelayanan publik secara optimal.

Dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat diatur dalam Pasal 34, ayat (1) yang menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan ayat (2) menyebutkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut ketentuan di atas, dapat kita lihat bersama bahwa urusan wajib pemerintahan baik berskala nasional maupun daerah propinsi atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kesejahteraan warganya.

Sedangkan syarat untuk mencapai pelayanan dasar yang optimal adalah tersedia dan berkesinambungan: pelayanan dasar tidak sulit ditemukan. Pelayanan harus dapat diterima dan tidak bertentangan adat, budaya, dan keyakinan masyarakat. Lokasi, distribusi, dan sarana perlu diperhitungkan dalam pelayanan publik agar mudah lebih dijangkau atau ditempuh dengan biaya sesuai

kemampuan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya bahwa aspek mutu harus memperhatikan tingkat kesempurnaan pelayanan, artinya memuaskan dengan tatacara yang etis dan standar yang ditetapkan.

Problem pelayanan pendidikan adalah pada Penerimaan Siswa Baru (PSB), siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri harus mendaftar ke sekolah swasta. Untuk belajar di sekolah swasta, masyarakat masih harus membayar iuran sekolah dan pendaftaran siswa baru. Bagi masyarakat yang belajar di sekolah negeri, hal itu tidak perlu dilakukan karena pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan Peraturan Walikota yang membolehkan pihak sekolah memungut sumbangan sukarela dana pendidikan dari orang tua murid. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Dinas Kota Tangerang Selatan:

*“.....Ada perwal: peraturan walikota no 36/2009 yang menyebutkan masyarakat boleh menyumbang dana pendidikan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaannya adalah sekolah membuat RKAS: rencana kerja anggaran sekolah, berapa kegiatan yang akan dilaksanakan, berapa jumlah bantuan yang ada dari pemerintah. Kemudian sekolah mengundang komite sekolah untuk bermusyawarah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yang merasa mampu ikut berpartisipasi menyumbang kekurangan kekurangannya....”*

Berdasarkan uraian diatas maka kebijakan yang sudah ada sebenarnya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun karena dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala dan persoalan-persoalan, salah satunya masalah ekonomi yang menyebabkan siswa lulusan sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah menengah pertama, maka kebijakan ini seharusnya disosialisasikan secara optimal ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak maupun yang berbasis teknologi informasi atau media elektronik.

Pemerintah perlu membangun sistem kerjasama yang baik kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan wajib belajar sembilan sembilan tahun secara terprogram. Dalam hal ini pemerintah melibatkan Pemerintah Kecamatan (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan) dan juga Kelurahan. Di samping itu, masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, seperti kelompok ibu-ibu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga

Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna, diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas jenis-jenis bantuan pendidikan, khususnya kepada keluarga siswa yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga dapat menikmati pendidikan sebagaimana mestinya.

